



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012–2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa potensi sektor kepariwisataan yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dikelola dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata DIY 2012–2025 harus disesuaikan dengan perkembangan daerah serta didasarkan pada isu terkini dan isu strategis di bidang pariwisata;
- c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012–2025 perlu diubah untuk mewujudkan pembangunan kepariwisataan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012–2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012–2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 3

- (1) Pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan berdasarkan pada RIPPARDA.
- (2) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2025.
- (3) Visi pembangunan kepariwisataan Daerah yakni terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Destinasi Pariwisata berbasis budaya terkemuka berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan masyarakat.
- (4) Misi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagai berikut:
 - a. mewujudkan Kepariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif;
 - b. menumbuhkembangkan atraksi wisata malam hari;
 - c. mengembangkan Daya Tarik Wisata berbasis budaya yang berkelas dunia;
 - d. mengoptimalkan Daya Tarik Wisata Daerah kawasan selatan sebagai kawasan pariwisata yang berorientasi pada nilai strategis Samudera Hindia;
 - e. meningkatkan daya saing Pariwisata pada tingkat nasional maupun global sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan, lama tinggal, dan pembelanjaan wisatawan; dan
 - f. mengembangkan kepariwisataan yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan.
- (5) Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:
 - a. mewujudkan pembangunan pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah;
 - b. mewujudkan kawasan Daerah bagian selatan sebagai kawasan baru pariwisata yang berorientasi pada nilai strategis Samudera Hindia;



- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal, dan pembelanjaan wisatawan;
 - d. meningkatkan produk domestik bruto, devisa Daerah, produk domestik regional bruto, pendapatan asli Daerah, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
 - e. mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra kawasan pariwisata daerah dan apresiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
 - f. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata, kerja sama antar usaha Pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - g. mengembangkan lembaga Kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata, dan pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien; dan
 - h. menjadikan kepariwisataan Daerah sebagai destinasi yang terintegrasi secara spasial dalam 5 (lima) Kabupaten/Kota dan temporal antara siang hari dan malam hari.
- (6) Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:
- a. terciptanya berbagai inovasi jenis Daya Tarik Wisata yang mampu menjadikan Daerah sebagai destinasi pariwisata Indonesia berkelas dunia dan mewujudkan kawasan Daerah bagian selatan sebagai kawasan pariwisata yang berorientasi pada nilai strategis Samudera Hindia;
 - b. tersedianya fasilitas pendukung Kepariwisataan yang handal dalam usaha meningkatkan kualitas paket Wisata yang variatif, yang dikelola secara sinergis dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan/atau



- oleh pelaku Wisata sehingga mampu meningkatnya kunjungan Wisatawan nusantara maupun mancanegara;
- c. mewujudkan Pariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata yang aman dan nyaman yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal, dan pembelanjaan Wisatawan;
 - d. meningkatnya produk domestik regional bruto, pendapatan Daerah, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan sekaligus menciptakan citra baru yang mampu memposisikan Daerah sebagai destinasi yang inovatif dan kreatif dengan dukungan diversifikasi tema produk yang beragam;
 - e. terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata sehingga mampu mendorong terwujudnya industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata, kerjasama antar usaha Pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
 - f. terwujudnya lembaga Kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata, dan pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien;
 - g. terciptanya sumber daya manusia Pariwisata yang handal dan profesional serta mewujudkan masyarakat sadar Wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona; dan
 - h. terwujudnya Pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah sebagai destinasi yang terintegrasi secara spasial dan temporal.
- (7) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah



Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat.

- (8) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam tiga (3) tahap sebagai berikut:
 - a. tahap I, tahun 2012–2014;
 - b. tahap II, tahun 2015–2019; dan
 - c. tahap III, tahun 2020–2025.
- (9) Sasaran yang akan dicapai dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kawasan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten/kota dan/atau lintas kabupaten/kota yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata daerah;
 - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional dan/atau nasional dan/atau internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) Kawasan strategis pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;



- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah maupun nasional; dan
 - k. memiliki potensi tren produk wisata masa depan dengan mendasar pada otentifikasi produk.
3. Ketentuan Pasal 17 diubah menjadi Pasal 17A, Pasal 17B, dan Pasal 17C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Strategi untuk pengembangan Daya Tarik Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dengan cara:
 - a. mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di berbagai Kawasan Pariwisata secara merata, terpadu dan komplementer, berdaya saing, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan tanggap bencana;
 - b. mengembangkan kawasan wisata tematis yang terpadu dan komplementer;
 - c. mengembangkan produk wisata baru berkelas dunia yang terfokus sebagai faktor pendorong dan daya tarik wisata malam hari;
 - d. mengembangkan acara bazaar dan kuliner;
 - e. mengembangkan acara budaya dan olahraga secara berkala; dan
 - f. memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata dan lingkungan.



- (2) Strategi untuk pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dengan cara:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen daya tarik dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan Kawasan Pariwisata Daerah;
 - b. Koordinasi, sinergi dan kemitraan pengembangan produk wisata lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan; dan
 - c. memperkuat upaya konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi.
- (3) Strategi untuk Pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, dengan cara:
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman Daya Tarik Wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, dengan cara:
 - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata;
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan;
 - c. memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata cagar budaya dan permuseuman;
 - d. memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik wisata berbasis teknologi dan pengetahuan tradisional, adat istiadat, bahasa dan seni; dan
 - e. menyinergikan keberadaan desa budaya sebagai destinasi wisata.

Pasal 17B

- (1) Strategi pengembangan lereng Merapi bagian selatan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, dengan cara mengembangkan:



- a. kawasan trekking Gunung Merapi-Cangkiringan (Kaliadem)-Hutan Wisata Kaliurang sebagai kawasan Wisata gunung berapi;
 - b. kawasan Gunung Merapi sebagai Taman Nasional Gunung Merapi;
 - c. Museum Gunung Merapi sebagai kawasan Wisata pendidikan Gunung Merapi;
 - d. kawasan warisan budaya Kaliurang sebagai kawasan Wisata berbasis pendidikan, budaya dan sejarah;
 - e. desa-desa di kawasan Gunung Merapi sebagai Kawasan Rantai Desa Wisata; dan
 - f. kawasan Pesona Alam Gunung Merapi.
- (2) Strategi pengembangan Prambanan-Ratu Boko dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, dengan cara mengembangkan:
- a. kawasan candi Prambanan, sendratari Ramayana, serta gedung kesenian Trimurti sebagai tempat pertunjukan budaya jawa;
 - b. kawasan situs Kraton Ratu Boko sebagai Wisata candi peninggalan kerajaan Mataram Hindu/Budha dan wisata pemandangan alam; dan
 - c. kawasan desa wisata dan desa budaya sebagai kawasan wisata berbasis budaya masyarakat.
- (3) Strategi pengembangan Godean-Moyudan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c, dengan cara mengembangkan:
- a. Sumberrahayu sebagai kawasan desa Wisata kerajinan tenun;
 - b. Sidokarto sebagai desa Wisata budaya;
 - c. Brajan sebagai kawasan desa Wisata kerajinan bambu;
 - d. Kwagon sebagai desa Wisata budaya; dan
 - e. Kawasan desa wisata dan desa budaya sebagai kawasan wisata berbasis budaya masyarakat
- (4) Strategi pengembangan Kawasan Kraton–Malioboro dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d, dengan cara mengembangkan:
- a. Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Taman Sari, Museum Sonobudoyo dan Museum Kereta sebagai kawasan cagar budaya dan Wisata Kraton;



- b. Masjid Gede, Suronatan, Kauman dan sekitarnya sebagai kawasan wisata sejarah, religi dan pendidikan;
 - c. *Njeron Beteng* sebagai kawasan Wisata berbasis budaya Jawa;
 - d. Malioboro sebagai kawasan cagar budaya dan koridor Wisata belanja;
 - e. Ketandan dan sekitarnya sebagai kawasan kampung pecinan;
 - f. Ndalem Mangkubumen-Ndalem Pujokusuman-Puro Pakualaman sebagai kawasan pelestarian dan pertunjukan kesenian Jawa;
 - g. kawasan Sumbu Filosofi sebagai kawasan Wisata pendidikan, budaya, dan sejarah;
 - h. kawasan Pakualaman sebagai kawasan cagar budaya;
 - i. kawasan Kotabaru sebagai kawasan cagar budaya;
 - j. kawasan Kotagede sebagai kawasan cagar budaya;
 - k. kawasan Maguwoharjo sebagai kawasan Wisata keluarga dan olahraga;
 - l. universitas dan sekolah di kawasan perkotaan sebagai Wisata pendidikan;
 - m. revitalisasi Gembira Loka sebagai Wisata pendidikan fauna dan rekreasi keluarga;
 - n. Ngasem-Ngabean sebagai kampung Wisata kuliner dan kerajinan;
 - o. ruang terbuka hijau; dan
 - p. Wisata Kesehatan-kebugaran, dan kecantikan tradisional dan modern sebagai Daya Tarik Wisata baru.
- (5) Strategi pengembangan kawasan Kasongan-Tembi-Wukirsari dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e, dengan cara mengembangkan:
- a. Kasongan sebagai kawasan desa Wisata kerajinan gerabah tradisional;
 - b. Gabusan-Manding-Tembi sebagai kawasan budaya dan kerajinan;
 - c. desa Wisata Wukirsari sebagai kawasan desa Wisata kerajinan;
 - d. desa Wisata Kebonagung sebagai desa Wisata pertanian tradisional;



- e. Kawasan Cerme sebagai kawasan Wisata susur Goa;
 - f. Makam Imogiri sebagai kawasan cagar budaya dan Wisata ziarah Kerajaan Mataram Islam;
 - g. Kerto-Pleret sebagai kawasan warisan budaya dan wisata sejarah budaya bekas Kerajaan Mataram Islam;
 - h. Mangunan sebagai kawasan Agrowisata dan alam;
 - i. Pundong sebagai kawasan desa Wisata kerajinan gerabah;
 - j. Goa Selarong-Krebet sebagai kawasan Wisata sejarah dan Wisata kerajinan;
 - k. Bendung Tegal sebagai kawasan Wisata tirta dan olah raga;
 - l. kawasan Goa Jepang sebagai Wisata sejarah dan alam; dan
 - m. desa Wisata dan desa budaya sebagai destinasi Wisata.
- (6) Strategi pengembangan Pantai Parangtritis-Depok-Kuwaru dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f, dengan cara mengembangkan:
- a. revitalisasi Parangtritis sebagai kawasan rekreasi pantai keluarga;
 - b. Pantai Depok sebagai kawasan Wisata kuliner hasil laut dan Wisata dirgantara;
 - c. Gumuk Pasir Barchans sebagai kawasan konservasi geospasial dan cagar biosfer;
 - d. Pantai Kuwaru-Goa Cemara-Samas-Pantai Baru sebagai kawasan Wisata pantai keluarga dan pendidikan;
 - e. Pantai Goa Cemara sebagai kawasan Wisata konservasi penyu;
 - f. Parangkusumo sebagai kawasan ritual budaya laut;
 - g. kawasan Parangtritis sebagai kawasan warisan budaya; dan
 - h. desa Wisata dan desa budaya sebagai destinasi Wisata.

Pasal 17C

- (1) Strategi pengembangan kawasan Pantai Baron-Pantai Sundak dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf g, dengan cara mengembangkan:



- a. Pantai Baron sebagai pantai rekreasi keluarga, pendidikan, dan kuliner hasil laut;
 - b. Pantai Krakal sebagai kawasan Wisata berbasis konservasi sumberdaya alam;
 - c. Pantai Sundak sebagai kawasan Wisata pantai dan relaksasi;
 - d. Pantai Kukup sebagai kawasan Wisata pantai berbasis pendidikan dan konservasi terumbu karang;
 - e. Pantai Ngrenahan-Pantai Gesing sebagai kawasan Wisata berbasis pasar dan perdagangan ikan;
 - f. Pantai Ngobaran sebagai kawasan Wisata pantai berbasis budaya tradisional; dan
 - g. Pantai Sepanjang sebagai kawasan Wisata pantai tropis alami.
- (2) Strategi pengembangan kawasan Siung-Wediombo-Bengawan Solo Purba dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf h, dengan cara mengembangkan:
- a. Pantai Siung sebagai kawasan Wisata minat khusus;
 - b. Wediombo sebagai kawasan Wisata pantai berbasis konservasi dan relaksasi;
 - c. Pantai Sadeng sebagai kawasan Wisata pantai berbasis pelabuhan perikanan; dan
 - d. Bengawan Solo Purba sebagai kawasan Wisata alam.
- (3) Strategi pengembangan Kawasan Patuk dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf i, dengan cara mengembangkan:
- a. Desa Wisata Bobung sebagai kawasan desa Wisata kerajinan Kayu Batik;
 - b. ekowisata Hutan Bunder dan Wanagama sebagai kawasan Wisata pendidikan, dan aktivitas Wisata luar ruangan; dan
 - c. Gunung Nglanggeran sebagai kawasan Wisata ekologi dan agrowisata.
- (4) Strategi pengembangan Karst Pegunungan Sewu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf j, dengan cara mengembangkan:
- a. Kalisuci (Goa Glatikan, Goa Gelong, Goa Buriomah, Goa Pindul, Goa Grubug dan Goa Jomblang) sebagai kawasan Wisata minat khusus dan pendidikan;



- b. Goa Bribin-Goa Grubug sebagai kawasan Wisata keluarga, pendidikan dan susur goa karst;
 - c. Goa Rancang Kencono-Air Terjun Sri Gethuk sebagai kawasan desa Wisata dan pendidikan;
 - d. Situs Sokoliman, Ngawen, Bleberan dan Plembutan sebagai kawasan wisata cagar budaya; dan
 - e. desa Wisata dan desa budaya sebagai destinasi Wisata.
- (5) Strategi pengembangan Congot-Glagah-Trisik dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf k, dengan cara mengembangkan:
- a. Congot sebagai kawasan Wisata alam keluarga dan Wisata ziarah Gunung Lanang;
 - b. Pantai Glagah sebagai kawasan Wisata minat khusus, pantai dan agrowisata;
 - c. Pelabuhan Karangwuni sebagai kawasan Desa Wisata;
 - d. Trisik sebagai kawasan desa Wisata pesisir pantai; dan
 - e. Girigondo sebagai kawasan Wisata sejarah budaya dan ziarah.
- (6) Strategi pengembangan kawasan pegunungan Menoreh dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf l, dengan cara mengembangkan:
- a. Waduk Sermo sebagai area Wisata air, Wisata luar ruangan dan olahraga;
 - b. Kalibiru sebagai kawasan desa Wisata;
 - c. Goa Kiskendo sebagai kawasan Wisata alam, Wisata luar ruangan;
 - d. Sentolo-Lendah sebagai kawasan desa Wisata;
 - e. Pendoworejo sebagai kawasan desa Wisata budaya;
 - f. Goa Sriti sebagai kawasan Wisata alam dan sejarah;
 - g. Banjarasri, Banjaroyo-Ancol, Banjar Arum sebagai kawasan agrowisata dan desa Wisata;
 - h. Nginggo sebagai desa Wisata alam;
 - i. Puncak Suroloyo sebagai kawasan Wisata spiritual dan alam;
 - j. Sendangsono sebagai kawasan Wisata ziarah;
 - k. Nanggulan-Pengasih sebagai kawasan Wisata kerajinan; dan
 - l. Kalibawang sebagai kawasan agrowisata.



4. Di antara Bagian Keempat dan Bagian Kelima disisipkan 2 (dua) bagian, yakni Bagian Keempat A dan Bagian Keempat B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat A
Akselerasi Pembangunan

Pasal 17D

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan akselerasi pembangunan terhadap kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dengan cara menentukan kawasan prioritas, pasar sasaran prioritas, dan penyelenggaraan event berkelas dunia.
- (2) Tujuan dari akselerasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain:
 - a. mencapai visi pembangunan Daerah pada tahun 2025;
 - b. mengoptimalkan upaya pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah; dan
 - c. mengoptimalkan jejaring dan kapasitas antara Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten, swasta, akademisi, komunitas, dan masyarakat.
- (3) Penentuan kawasan prioritas, pasar sasaran prioritas, dan penyelenggaraan event berkelas dunia serta peta jalan (*road map*) kebijakan strategis dan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17E

- (1) Dalam melaksanakan akselerasi pembangunan terhadap kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan/apresiasi kepada pelaku Wisata dan seni.
- (2) Pemberian penghargaan/apresiasi kepada pelaku wisata dan seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat B
Pariwisata Halal

Pasal 17F

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pariwisata halal yang didasarkan atas kearifan lokal.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
5. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Strategi untuk pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dengan cara mengembangkan:
 - a. moda transportasi darat dan penyebarangan unik yang nyaman, aman dan selamat disepanjang koridor Pariwisata utama;
 - b. moda transportasi perkeretaapian yang nyaman, aman dan selamat sebagai pendukung pembangunan Kepariwisataaan;
 - c. moda transportasi udara yang nyaman, aman, selamat dan memenuhi kebutuhan penerbangan internasional sebagai gerbang utama Pariwisata untuk pendukung pembangunan Kepariwisataaan;
 - d. moda transportasi penunjang pengembangan bandar udara yang nyaman dan aman;
 - e. moda transportasi penghubung antara Daya Tarik Wisata dan bandar udara yang nyaman dan aman;
 - f. penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki; dan
 - g. fasilitasi sarana bagi wisatawan penyandang disabilitas.
- (2) Strategi untuk pengembangan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dengan cara mengembangkan prasarana:
 - a. transportasi darat yang nyaman, aman dan selamat di sepanjang koridor Pariwisata utama;
 - b. transportasi perkeretaapian yang nyaman, aman, dan selamat sebagai pendukung pembangunan Kepariwisataaan;
 - c. transportasi udara yang nyaman, aman, selamat dan memenuhi kebutuhan penerbangan internasional sebagai gerbang utama Pariwisata untuk pendukung pembangunan Kepariwisataaan;



- d. penunjang pengembangan bandar udara internasional sebagai gerbang utama Pariwisata; dan
 - e. penghubung antara Daya Tarik Wisata dan Bandar Udara yang nyaman dan aman.
- (3) Strategi untuk pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dengan cara mengembangkan sistem:
- a. transportasi darat yang nyaman, aman dan selamat di sepanjang koridor Pariwisata utama;
 - b. transportasi perkeretaapian yang nyaman, aman dan selamat sebagai pendukung pembangunan Kepariwisataaan;
 - c. transportasi udara internasional sebagai gerbang utama Pariwisata untuk pendukung pembangunan Kepariwisataaan;
 - d. penunjang pengembangan bandar udara internasional sebagai gerbang utama Pariwisata; dan
 - e. terpadu penghubung antara Daya Tarik Wisata dan Bandar Udara.
6. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dengan cara:
 - a. mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Kepariwisataaan;
 - b. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan Pariwisata; dan
 - c. meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki daya saing internasional melalui pelatihan dan sertifikasi.
- (2) Strategi untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata; dan



- d. intensifikasi pemasaran MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain.
- (3) Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dengan fokus terhadap pengembangan segmen keluarga dan komunitas/ tradisi budaya, pengembangan segmen ceruk pasar dengan fokus terhadap pengembangan segmen MICE sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf c, dengan cara:
 - a. mengembangkan segmen pasar wisatawan berbasis komunitas;
 - b. mengoptimalkan segmen kunjungan teman dan relasi terutama saat lebaran dan wisuda;
 - c. merevitalisasi dan mendiversifikasi produk-produk wisata bagi wisatawan;
 - d. memberikan intensif khusus wisata bagi wisatawan;
 - e. mengakselerasi program-program promosi wisata secara lebih terfokus;
 - f. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
 - g. meningkatkan publikasi promosi pariwisata; dan
 - h. mengembangkan segmen wisata MICE.
 - (4) Strategi untuk pengembangan dan pemantapan citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata bertaraf Internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf d, meliputi :
 - a. mengembangkan even budaya, kesenian dan olah raga berkelas dunia yang didukung lintas sektor dan lintas wilayah;
 - b. mengembangkan dan memantapkan *positioning*; dan
 - c. mengembangkan program perlindungan hak-hak konsumen.
 - (5) Strategi untuk pengembangan citra kepariwisataan Daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, dengan cara meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata.
 - (6) Strategi untuk peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata sebagai mana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, dengan cara:



- a. mengoptimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak, media elektronik maupun media jejaring atau dalam jaringan;
 - b. mendorong pemasaran digital;
 - c. meningkatkan kehadiran media dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata daerah agar lebih dikenal luas ke dunia Internasional;
 - d. mempromosikan dan mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan dalam jumlah besar; dan
 - e. melibatkan masyarakat dalam penanganan pembenahan citra pasca bencana alam atau krisis lainnya.
- (7) Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, dengan cara:
- a. mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata Daerah;
 - b. mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan;
 - c. memfasilitasi pembentukan organisasi pengembangan destinasi; dan
 - d. optimalisasi Pusat Pelayanan Informasi Pariwisata.
- (8) Strategi untuk pendukung kebijakan promosi penggerak wisatawan, sebagaimana yang di maksud di dalam Pasal 28 huruf h dilaksanakan dengan menyelenggarakan aneka program pendukung penerapan cuti bersama oleh pemerintah pusat.
- (9) Strategi untuk pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 huruf i, adalah mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai lembaga promosi dan pemasaran Pariwisata sektor swasta yang bersifat mandiri.
8. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 31

- (1) Strategi untuk peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dengan cara:
 - a. meningkatkan daya saing usaha Pariwisata;
 - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
 - c. peningkatan program dengan prinsip berkelanjutan pada industri pariwisata;
 - d. penerapan standar produk, pelayanan dan pengelolaan untuk menjadi acuan bagi industri pariwisata; dan
 - e. peningkatan kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan industri pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan fasilitasi, regulasi, dan insentif untuk pengembangan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dengan cara meningkatkan:
 - a. sistem dan skema fasilitasi untuk usaha Pariwisata;
 - b. sistem dan skema regulasi untuk usaha Pariwisata; dan
 - c. penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di Kawasan Pariwisata.
- (3) Strategi untuk penguatan struktur usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dengan cara:
 - a. memfasilitasi pembentukan organisasi industri Pariwisata; dan
 - b. memperkuat mata rantai penciptaan nilai.
- (4) Strategi untuk penguatan kemitraan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, dengan cara:
 - a. mengembangkan pola-pola kerjasama industri lintas sektor;
 - b. mengembangkan pola-pola kerjasama untuk keadaan darurat;
 - c. mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendukung usaha Kepariwisata; dan
 - d. penguatan kemitraan dengan pelaku industri pariwisata Kabupaten/Kota/Provinsi/Regional dan tingkat ASEAN.



9. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Strategi untuk restrukturisasi dan reposisi organisasi Kepariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilaksanakan melalui reposisi urusan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah dan pembentukan ulang model kelembagaan pengelolaan bidang pariwisata yang efektif.
- (2) Strategi untuk optimalisasi koordinasi antar dinas dan dengan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dilaksanakan melalui perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor dan instansional serta penyusunan arahan dan program terpadu pengembangan kelembagaan.
- (3) Strategi untuk optimalisasi organisasi Kepariwisata swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dengan cara:
 - a. menguatkan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan Kepariwisata melalui kemitraan swasta dan Pemerintah Daerah;
 - b. mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang Pariwisata;
 - c. peningkatan kualitas dan kontinuitas pendidikan dan pelatihan bagi pengelola Daya Tarik Wisata; dan
 - d. pembinaan kelompok sadar wisata secara berkelanjutan sebagai agen dalam mendukung pengembangan pariwisata.
- (4) Strategi untuk optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, dengan cara:
 - a. memperkuat sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat;
 - b. memperbaiki pelayanan kepada swasta dan masyarakat; dan
 - c. studi banding dalam pengelolaan kepariwisataan yang professional.



10. Lampiran I dan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Februari 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

GATOT SAPTADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO IS.
NIP. 19640714 199102 1 001

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR
1.

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (1-54/2019)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012–2025

I. UMUM

Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan–kawasan dunia lainnya. Kedudukan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan nasional semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja di berbagai wilayah di Indonesia. Dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global, telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu, dan sekaligus komprehensif mencakup keseluruhan komponen pembangunan kepariwisataan yang terkait, baik dari aspek industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, maupun kelembagaan.

RIPPARDA akan menjadi pondasi dan dasar yang sangat penting bagi pengembangan dan pengelolaan sumber daya pariwisata budaya dan alam yang tersebar di seluruh Daerah. RIPPARDA secara konkrit akan memberikan visi, arah, dan rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan–kawasan wisata baik yang sudah layak disebut unggulan maupun yang potensial di seluruh Daerah. RIPPARDA ini sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait baik di tingkat pusat maupun daerah, baik pemerintah/sector publik, swasta, maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata secara terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Keseluruhan substansi yang dicakup dalam penyusunan RIPPARDA tersebut selanjutnya akan menjadi kunci atau *roadmap* yang sangat penting dalam membangun dan membangkitkan keunggulan banding dan keunggulan saing pariwisata Daerah dalam peta pariwisata nasional dan internasional di abad 21 ini, dan khususnya dalam meningkatkan



kontribusi sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pendapatan asli daerah dan menggantikan kontribusi sektor lain di masa mendatang.

RIPPARDA diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya di daerah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan daerah. RIPPARDA sangat penting, karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan (dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dsbnya), sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. mengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait (lintas sektor, lintas pelaku, lintas daerah/ wilayah) agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

Berkaitan dengan hak tersebut di atas dalam rangka menangkap isu-isu strategis dan terkini di bidang pariwisata khususnya di ranah global dan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012–2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO IS.
NIP. 19640714 199102 1 001



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
2012–2025

SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sasaran	Moderat			Optimistis		
	2014	2019	2025	2014	2019	2025
Jumlah Wisatawan Mancanegara (orang)	220.815	571.281	1.474.333	253.496	1.005.454	2.506.366
LOS Wisatawan Mancanegara (hari)	2,33	2,36	3,00	2,94	2,71	4,05
Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (US \$)	1.578,23	886,79	1.128,58	1.759,73	1.046,41	1.534,86
Jumlah Wisatawan Nusantara (orang)	1.502.321	5.427.818	10.320.353	1.682.498	6.784.773	15.480.530
LOS Wisatawan Nusantara (hari)	2,24	2,14	2,73	2,84	2,47	3,68
Pengeluaran Wisatawan Nusantara (rupiah)	1.423.412	1.908.548	2.428.919	1.850.436	2.252.087	3.303.330
PDRB (%) Perdagangan, Hotel, & Restoran	5,9%	11.54%	14.68%	6,6 %	13.27%	19.82%



Catatan: Hasil Kajian tahun 2017

a. Pertumbuhan Moderat :

Diasumsikan terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari jumlah kunjungan Wisatawan, didukung dengan pelaksanaan beberapa kebijakan, strategi dan indikasi program dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, baik untuk destinasi Pariwisata, pemasaran Pariwisata, industri Pariwisata, dan kelembagaan Kepariwisata.

b. Pertumbuhan Optimistis :

Diasumsikan terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari jumlah kunjungan Wisatawan, didukung sepenuhnya oleh seluruh sektor dalam melaksanakan seluruh arah kebijakan, strategi dan indikasi program dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, baik untuk destinasi Pariwisata, pemasaran Pariwisata, industri Pariwisata, dan kelembagaan Kepariwisata.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO IS.
NIP. 19640714 199102 1 001



LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
 2012-2025

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

TAHAPAN DAN URAIAN

NO	TAHAPAN	URAIAN
1.	Tahapan I 2012 – 2014 :	a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait yang kreatif dan inovatif;
		b. memperkuat upaya konservasi sumber daya Wisata dan lingkungan;
		c. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat sadar Wisata dalam mewujudkan sapta pesona bagi terciptanya iklim kondusif Kepariwisata;
		d. mengembangkan model-model promosi dan pemasaran Kepariwisata dalam memperluas jaringan pasar, baik pasar Wisatawan nusantara maupun Wisatawan mancanegara;
		e. mengembangkan fasilitasi, regulasi, insentif dan disinsentif untuk pengembangan usaha Pariwisata; dan
		f. optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten /Kota, swasta dan masyarakat.
7.	Tahapan II 2015 – 2019 :	a. mengembangkan inovasi dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan Pariwisata Daerah;
		b. meningkatkan kualitas dan kuantitas moda, sarana prasana, dan sistem transportasi darat, udara dan perkeretaapian sekaligus pengembangan sistem transportasi multimoda dan antarmoda yang aman, nyaman, lancar dan berbudaya;
		c. mengembangkan paket Wisata terpadu antarobyek dan antardaerah yang didukung oleh



NO	TAHAPAN	URAIAN
		<p>meningkatnya dukungan sektor lain (perhubungan, pendidikan, perdagangan, jasa, pertanian, industri, perhotelan) terhadap sektor Pariwisata;</p> <p>d. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam Kepariwisataan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui Kepariwisataan;</p> <p>e. mengembangkan citra Kepariwisataan Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;</p> <p>f. meningkatkan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang Pariwisata; dan</p> <p>g. standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Industri di bidang Pariwisata.</p>
14.	Tahapan III 2020 – 2025 :	<p>a. terwujudnya tujuan Wisata yang inovatif, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan pendapatan Daerah dan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>b. terwujudnya pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan baik nusantara maupun mancanegara;</p> <p>c. terwujudnya industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya;</p> <p>d. terwujudnya organisasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan masyarakat, berkembangnya Sumber Daya Manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Kepariwisataan yang berkelanjutan;</p> <p>e. terwujudnya masyarakat sadar Wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona; dan</p> <p>f. terwujudnya Daerah sebagai daerah tujuan Wisata berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara yang mempunyai ciri khas dan kekhususan daerah dengan keanekaragaman Daya Tarik Wisata dan budaya.</p>



DESTINASI PARIWISATA

A. PERWILAYAHAN PARIWISATA

Arah Kebijakan 1: Perencanaan pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI TERKAIT
			I	II	III	
1.	Menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Srategis Pariwisata Daerah;	a. pengembangan rencana detail pembangunan Kawasan Pariwisata; dan				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di Perencanaan Pembangunan dan bidang Kepariwisata
		b. pengembangan rencana detail pembangunan Kawasan Srategis Pariwisata.				
2.	Menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Srategis Pariwisata Daerah;	pengembangan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada Daya Tarik Wisata prioritas di Kawasan Srategis Pariwisata Daerah, yang mencakup: Kawasan Lereng Merapi bagian selatandan sekitarnya, Prambanan – Ratu Boko dan sekitarnya, Kraton – Malioborodan sekitarnya, Kasongan – Tembi – Wukursaridan sekitarnya, Congot – Glagah – Trisikdan sekitarnya, Parangtritis – Depok – Kuwarudan sekitarnya, Baron – Sundak dan sekitarnya, Siung – Wediombo – Bengawan Solo Purbadan sekitarnya, Karst Pegunungan Sewudan sekitarnya, Patukdan sekitarnya dan Pegunungan Manorehdan sekitarnya				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang tata ruang, tata bangunan, dan lingkungan

Arah Kebijakan 2: Penegakan Regulasi Pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Srategis Pariwisata Daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah	a. penyiapan rancangan peraturan tentang rencana induk Kawasan Pariwisata;				SKPD yang bertanggung jawab di bidang tata



NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	terhadap penerapan Rencana Detail Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah	b. penyiapan rancangan peraturan tentang rencana detail Kawasan Srategis Pariwisata Daerah;				ruang, tata bangunan, dan lingkungan
		c. penyiapan rancangan peraturan tentang tata bangunan dan lingkungan pada Daya Tarik Wisata prioritas di Kawasan Srategis Pariwisata Daerah;				
		d. penetapan regulasi rencana induk Kawasan Pariwisata;				
		e. penetapan regulasi rencana detail Kawasan Strategis Pariwisata; dan				
		f. penetapan regulasi tentang tata bangunan dan lingkungan pada Daya Tarik Wisata prioritas di Kawasan Strategis Pariwisata;				

Arah Kebijakan 3: Pengendalian Implementasi Pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Srategis Pariwisata Daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.	a. penyebarluasan informasi dan publikasi Peraturan tentang Kawasan Pariwisata Daerah, dan Kawasan Srategis Pariwisata Daerah; dan				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. penyusunan standar operating penyebaran informasi dan publikasi peraturan tentang Kawasan Pariwisata, dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah kepada masyarakat dan pelaku usaha Pariwisata;				



B. DAYA TARIK WISATA

Arah Kebijakan Pengembangan Daya Tarik Wisata meliputi :

Arah Kebijakan 1: Perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Kawasan Pariwisata Daerah dan pengembangan daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di berbagai kawasan Pariwisata	a. fasilitasi perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata alam, budaya dan khusus/ buatan bagi segmen Wisata massal (<i>mass market</i>) maupun bagi segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>) di kawasan yang belum berkembang;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. fasilitasi perencanaan dan perintisan pengembangan sarana prasarana dasar di kawasan yang belum berkembang;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pembangunan fasilitas
		c. fasilitasi pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan Daya Tarik Wisata yang telah berkembang di sekitar lokasi baik;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		d. fasilitasi pemberian arahan bagi masyarakat setempat mengenai pengelolaan dan pemeliharaan untuk mewujudkan <i>community based tourism</i> di kawasan yang belum berkembang;				
		e. fasilitasi para pelaku usaha didalam pengembangan kawasan Pariwisata; dan				
		f. fasilitasi pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai Daya Tarik Wisata bahari dan alam berbasis budaya dan konservasi .				



NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		g. fasilitasi pengembangan Pulau Timang, Kalong, Drini, Jumpino dan Pulau Watunganten sebagai wisata bahari dan wisata minat khusus.				
2.	Memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata dan lingkungan	a. penguatan upaya konservasi dan pengelolaan berkelanjutan terhadap sumber daya Kepariwisata, budaya, dan lingkungan spesifik (bentang alam/ budaya) di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata; dan				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan kawasan sebagai sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya.				

Arah Kebijakan 2: Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan Pariwisata Daerah.	a. penguatan interpretasi dan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing Daya Tarik Wisata alam, budaya dan khusus/ buatan yang sedang berkembang;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan dengan Daya Tarik Wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks regional, maupun nasional dan internasional; dan				
		c. peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas				



NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		kegiatan Kepariwisata di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata.				
2.	Memperkuat upaya konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya	a. pengawasan pembangunan dan konservasi sumber daya Kepariwisata dan lingkungan spesifik (bentang alam/ budaya) di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata ;dan				
		b. pengembangan kawasan sebagai sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya.				

Arah Kebijakan 3: Pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan diversifikasi atau keragaman Daya Tarik Wisata.	a. pengembangan rentang aktifitas Wisata dalam berbagai skala (<i>hard - soft attraction</i>) pada manajemen atraksi Daya Tarik Wisata alam, budaya dan buatan/ khusus untuk menarik segmen Wisatawan massal (<i>mass market</i>) dan segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>);				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan terpadu yang saling melengkapi; dan				
		c. peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang



NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		Kepariwisata di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata.				bertanggung jawab di bidang pengawasan pembangunan dan sarana prasarana
2.	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.	a. peningkatan Pengawasan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya Kepariwisata untuk mendukung keberlanjutan kegiatan Kepariwisata di lokasi Daya Tarik Wisata; dan				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan kawasan sebagai sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya.				
		c. Pengembangan program promosi dalam menarik wisatawan tujuan Solo dan Borobudur				

Arah Kebijakan 4: Revitalisasi Daya Tarik Wisata Dalam Upaya Peningkatan Kualitas, Keberlanjutan Dan Daya Saing Produk Dan Kawasan Pariwisata Daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata.	a. Inovasi manajemen daya tarik dengan pengembangan tema dan even khusus (<i>soft attraction</i>) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan program-program interpretasi termasuk yang berbasis teknologi;				
		c. pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan Daya Tarik Wisata pendukung di sekitar lokasi dalam konteks regional, nasional dan				



NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		internasional;dan d. peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan Kepariwisata di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata;				
5.	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan.	a. peningkatan Pengawasan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya Kepariwisata untuk mendukung keberlanjutan kegiatan Kepariwisata di lokasi Daya Tarik Wisata;dan b. pengembangan kawasan sebagai sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya.				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
7.	Memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata permuseuman berbasis budaya dan sejarah.	a. inovasi manajemen Daya Tarik Wisata museum dengan pengembangan tema dan even khusus (<i>soft attraction</i>) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan; b. pengembangan teknologi audio visual yang atraktif dan inovatif dalam rangka modernisasi museum; c. peningkatan kualitas dan kapasitas museum untuk meningkatkan kualitas kegiatan Kepariwisata berbasis museum; d. fasilitasi Wisata pendidikan berbasis museum ;dan e. fasilitasi pengembangan Wisata pendidikan baik formal maupun non formal.				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata



Arah Kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata meliputi :
Arah Kebijakan 1: Pengembangan Lereng Merapi bagian Selatan sebagai kawasan Wisata alam Gunung Merapi dan Desa Wisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan kawasan <i>tracking</i> Merapi – Cangkringan (Kaliadem) – Hutan Wisata Kaliurang sebagai kawasan Wisata Erupsi Lava .	a. pengembangan paket <i>Wisatalava tour</i> ;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan rute Wisata jelajah dan bersepeda di kawasan kalikuning-kaliadem-kaliurang;				
		c. pengembangan Wisata ziarah kinahrejo ; dan				
		d. pengembangan <i>view point</i> dengan menambahkan shelter – shelter di area sepanjang jalur jelajah Merapi-Cangkringan-Hutan Wisata Kaliurang dalam menunjang aktivitas melihat pemandangan alam.				
2.	Mengembangkan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebagai Taman Nasional Gunung Merapi.	a. penataan zonasi pemanfaatan kawasan Taman Nasional Gunung merapi;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan Wisatajelajah <i>Merapi</i> ;				
		c. pengembangan Wisata susur hutan dan <i>ekowisata</i> di Taman Nasional Gunung Merapi ;				
		d. Pengembangan Wisata pendidikan geografi dan geologi (<i>geo-tourism</i>); dan				
		e. penataan dan pengemasan interpretasi flora fauna dan signance di Taman Nasional Gunung Merapi.				
3.	Mengembangkan Museum Gunung Merapi sebagai kawasan Wisata Pendidikan Gunung Merapi.	a. penataan display diorama yang representatif untuk WisataPendidikan kebencanaan gunungapi, gempabumi, sesuai visi museum “merapi jendela bumi”;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan sarana interpretasi dan Pendidikan				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		<p>museum berupa atraksi, replika, dan <i>audiovisual</i> yang dapat secara dinamis menggambarkan kawasan Gunung Merapi sebagai <i>the legendary vulcanology</i> audio-visual kepada Wisatawan;</p> <p>c. pengemasan display museum Gunung merapi dengan memperkuat daya tarik melalui efek pencahayaan artivisual (<i>lighting effect</i>) untuk mendukung kepuasan pengalaman pengunjung ;</p> <p>d. pengembangan area museum sebagai tempat pementasan (<i>venue</i>) pertunjukan seni dan budaya;dan</p> <p>e. penggunaan teknologi dalam mendukung Pengembangan sarana interpretasi dan Pendidikan museum.</p>				
4.	Mengembangkan kawasan Ulen Sentalu sebagai kawasan pendidikan, budaya dan sejarah	<p>a. pengembangan paket jejaring Wisata pendidikan, budaya dan sejarah; dan</p> <p>b. pengembangan even-even budaya rutin (pagelaran musik, kesenian, peragaan busana, pameran kebudayaan dan lain-lain).</p>				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
5.	Mengembangkan desa – desa di kawasan Gunung Merapi sebagai Kawasan Rantai Desa Wisata.	<p>a. pengembangan Wisata agro dengan kegiatan petik buah;</p> <p>b. pengembangan Wisata jelajah desa Wisata dan pengamatan kegiatan bertani masyarakat lokal (<i>filedtrip</i>);</p> <p>c. pengembangan even-even budaya lokal secara rutin ;</p> <p>d. pengembangan sarana dan pra sarana dasar yang dapat menunjang kegiatan Pariwisata desa;</p>				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		e. pengembangan <i>viewpoint</i> pada bagian agroWisata untuk menunjang aktivitas <i>agro-tourism</i> ;				
		f. pengembangan Wisata jelajah desa Wisata dan pengamatan kegiatan budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat lokal (<i>fieldtrip</i>);				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		g. pengembangan Wisata pendidikan budaya (belajar tari, wayang, batik dan sebagainya);				
		h. pengembangan kawasan desa – desa di kawasan Pakem, Ngaglik, Ngemplak sebagai <i>venue</i> khusus untuk aktivitas fotografi;				
		i. pengembangan sarana dan prasarana dasar yang dapat menunjang kegiatan Pariwisata desa; dan				
		j. pengembangan <i>viewpoint</i> pada area desa Wisata untuk menunjang aktivitas melihat pemandangan alam.				
6.	Mengembangkan kawasan Pesona Alam Gunung Merapi di kawasan Cangkringan.	a. pengembangan paket Wisata di kawasan Cangkringan;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pemantauan dan pengawasan terhadap perkembangan kawasan; dan				
		c. penataan dan pengembangan lansekap dan zonasi .				
7.	Mengembangkan The lost world castle & The Stonehenge sebagai wisata buatan	a. penataan dan pengembangan kawasan wisata geo park				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. sertifikasi pemandu wisata				
		c. pengembangan event-event kebudayaan tingkat dunia				
8.	Pengembangan Bhumi Merapi	a. penataan dan pengembangan kawasan merapi				Organisasi perangkat



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	sebagai wisata agro	sebagai new agrotourism				daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. penataan dan pengembangan kawasan merapai sebagai <i>venue</i> khusus untuk aktivitas fotografi				

Arah Kebijakan 2: Pengembangan Prambanan – Ratu Boko sebagai kawasan WisataPurbakala dan Budaya

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan kawasan Candi Prambanan, Sendratari Ramayana, serta Gedung Kesenian Trimurti sebagai tempat pertunjukan Budaya Jawa.	a. pengembangan kawasan sebagai sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan kawasan Kompleks Candi Prambanan, Sendratari Ramayana, serta Gedung Kesenian Trimurti dengan diadakannya pertunjukan seni dan budaya lokal secara berkala;				
		c. penataan kawasan sekitar kawasan Kompleks Candi Prambanan, Sendratari Ramayana, serta Gedung Kesenian Trimurti dalam menunjang aktivitas melihat pemandangan alam sekitar;				
		d. pengembangan kuliner tradisional; dan				
		e. pengembangan sistem pencahayaan pada malam hari.				
3.	Mengembangkan kawasan Situs Kraton Ratu Boko sebagai WisataCandi peninggalan Kerajaan Boko.	a. pengembangan kawasan sebagai sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan jalur heritage;				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		c. penataan kawasan sekitar kawasan Situs Kraton Ratu Boko dalam menunjang aktivitas melihat pemandangan alam;				
		d. pengembangan area kuliner tradisional dengan konsep terbuka; dan				
		e. pengembangan sistem pencahayaan pada malam hari.				
5.	Mengembangkan situs – situs candi di sekitar candi Kalasan, candi Prambanan, dan Kraton Ratu Boko sebagai kawasan Wisata berbasis budaya hindu.	a. pengembangan kawasan sebagai sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan Wisata jelajah situs-situs;				
		c. pengembangan shelter rest area;				
		d. pengembangan paket Wisataziarah hindu di kawasan candi prambanan;				
		e. pengembangan aktifitas berbasis heritage sebagai penunjang Wisata susur dan Wisatam elihat pemandangan alam; dan				
		f. pengembangan kuliner tradisional di kawasan situs – situs candi.				
4	Pengembangan objek spot riyadi dan Tebing breksi sebagai wisata alam	a. penataan dan pengembangan spot riyadi dan tebing breksi				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. sertifikasi pemandu wisata alam				
		c. event-event kebudayaan berkelas dunia				
5	Pengembangan <i>event jazz</i> yang dilaksanakan rutin di kawasan hiburan	a. aktivias wisata pada malam hari untuk meningkatkan <i>Length of stay</i>				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan event-event wisata hiburan sejenis				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		yang bernuansa lokal				

Arah Kebijakan 3 : Pengembangan Godean – Moyudan sebagai kawasan Wisatapedesaan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Sumberrahayu sebagai kawasan desa Wisata kerajinan tenun.	a. pengembangan Wisata kerajinan tenun; b. pengembangan bazar dan kuliner; c. pengembangan Wisata <i>live-indi</i> desa-desa pengerajin; dan d. pengembangan even berbasis budaya.				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
5.	Mengembangkan Sidokarto sebagai desa Wisata budaya	a. pengembangan <i>live-in</i> Wisata desa budaya (kesenian, kerajinan); b. pengembangan rumah peristirahatan (<i>homestay</i>); dan c. pengembangan even berbasis budaya.				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
8.	Mengembangkan Brajan sebagai kawasan desa Wisata kerajinan bambu.	a. pengembangan Wisata <i>live-in</i> di desa-desa pengerajin; b. pengembangan even berbasis budaya; c. pengembangan kesenian Kuntulan; dan d. pengembangan bazar dan kuliner.				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
12.	Mengembangkan Kwagon sebagai desa Wisata budaya.	a. pengembangan even budaya secara berkala; b. pengembangan Wisata <i>live-in</i> ; dan c. pengembangan bazar dan kuliner.				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
15.	Mengembangkan Gamping sebagai kawasan desa Wisata.	a. pengembangan even berbasis budaya; b. pengembangan kesenian Bekakak; dan				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		c. pengembangan bazar dan kuliner.				bertanggung jawab di bidang Kepariwisata

Arah Kebijakan 4 : Pengembangan Kraton – Malioboro sebagai kawasan Wisata berbasis budaya dan kehidupan perkotaan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Taman Sari, Museum Sonobudoyo dan Museum Kereta sebagai kawasan cagar budaya dan Wisata keraton	<p>a. pengembangan kawasan sebagai sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya;</p> <p>b. pemanfaatan jalur budayasebagai unsur penting baik dalam atraksi, pembangunan fisik, dan proses penyediaan jasa;</p> <p>c. pengembangan dan pelestarian atraksi tetap yang bersifat pertunjukan seni tradisionalatau upacara perayaan yang diadakan di sekitar kawasan Kompleks Kraton sebagai venue seperti sekaten, topo bisu, grebeg syawal;</p> <p>d. pengembangan efect cahaya artivisual di sekitar kawasan untuk memperkuat pengalaman ruang;</p> <p>e. revitalisasi taman sari sesuai dengan fungsi dan kondisi aslinya;</p> <p>f. revitalisasi Museum Sonobudoyo dengan sarana audiovisual yang lebih modern dan representatif;dan</p> <p>g. revitalisasi dan pengembangan Masjid Pathok Nagari, Kraton sebagai kawasan Wisata ziarah dan religi.</p>				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
3.	Mengembangkan Njeron Beteng sebagai kawasan	a. pengembangan pencahayaan buatan untuk mendukung kesan ruang;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	Wisata budaya Jawa	b. pengembangan area njeron banteng sebagai ruang display dan bazar yang terdiri kerajinan tangan khas lokal (souvenirs dan handicraft) serta workshop;				bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		c. pengembangan kawasan Njeron Beteng sebagai venue khusus untuk aktivitas fotografi;				
		d. pengembangan Wisata jelajah tamansari-masjid bawah tanah-benteng dan sekitarnya dengan konsep jalur sejarah kraton;dan				
		e. pengembangan bekas pasar Ngasem sebagai area kuliner .				
4.	Mengembangkan Malioboro sebagai kawasan cagar budayadan koridor Wisata belanja.	a. pengembangan kawasan sebagai sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan <i>signage</i> yang mendukung penciptaan Malioboro ruang sebagai area publik dengan kesan tradisonal;				
		c. penerapan arsitektur berbasis budaya dalam pembangunan maupun pengembangan bangunan – bangunan komersial;				
		d. pengembangan festival malioboro sebagai festival tahunan;				
		e. pengembangan ornamen yang menggunakan berbasis budaya pada fasilitas jalan raya (<i>street furniture</i>)malioboro ;				
		f. pengembangan tema berbasis budayalokal pada kawasan – kawasan di area malioboro (misal kampung pecinan, kampung india, jawa);				
		g. pengembangan pencahayaan kota di kawasan				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		Malioboro;				
		h. pengembangan fasilitas jalan raya (<i>street furniture</i>) di sepanjang jalan malioboro; dan				
		i. pengembangan parking area bagi transportasi tradisional di sepanjang jalan malioboro.				
6.	Mengembangkan Ketandan dan sekitarnya sebagai kawasan kampung pecinan.	a. pengembangan paket Wisata pecinan; b. pengembangan even budaya Tionghua secara berkala; c. pengembangan langgam arsitektural cina; d. pengembangan kuliner khas pecinan; dan e. pengembangan area bazar dan perbelanjaan berbasis budaya cina.				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
11.	Mengembangkan Ndalem Mangkubumen – Ndalem Pujokusuman – Puro Pakualaman sebagai kawasan Pertunjukan Kesenian Jawa.	a. pengembangan pusat pertunjukan kesenian jawa di Ndalem Pujokusuman; b. pengembangan pertunjukan kesenian jawa di Puro Pakualaman ; c. revitalisasi bangunan Ndalem Pujokusuman-Puro Pakualaman; dan d. pengembangan paket Wisata khusus museum heritage di Ndalem Pujokusuman-Puro Pakualaman;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
12.	Mengembangkan Titik Nol sebagai kawasan Wisata Pendidikan, budaya, dan sejarah.	a. pengembangan paket Wisata Pendidikan dengan rute Taman Pintar – Benteng Vrederburg – Taman Budaya – Shopping Center; b. penataan dan pengembangan lansekap dan zonasi Taman Pintar – Benteng Vrederburg – Taman Budaya; c. pengembangan pertunjukan kesenian berbasis budaya di sekitar kawasan Taman Pintar – Benteng Vrederburg – Taman Budaya; dan				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		d. pengembangan even seni berbasis budaya secara berkala.				
13.	Mengembangkan Kotagede sebagai kawasan cagar budaya	a. pengembangan kawasan sebagai sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan suasana kawasan Kotagede dengan konsep kerajinan perak yang terdiri dari pemanfaatan berbagai macam unsur – unsur budaya lokal; dan				
		c. pengembangan kawasan kotagede sebagai ruang display dan bazar kerajinan perak khas lokal (souvenirs and handicraft silver) .				
15.	Mengembangkan stadion Maguwarjo – Candi Gebang – Embung Tambakboyo sebagai kawasan Wisata keluarga dan olahraga.	a. pengembangan Wisata keluarga di kawasan Maguwoharjo dan Embung Tambakboyo;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan aktifitas luar ruangan seperti memancing, mini atv dan lain sebagainya; dan				
		c. pengembangan fasilitas publik area (peneduh, vegetasi, benches dan lain-lainl).				
16.	Mengembangkan Jalan Margo Utomo sebagai kawasan Taman Sepeda.	a. pengembangan fasilitas rest area (benches, peneduh);				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan ruang bazar kuliner di kawasan Mangkubumi;				
		c. pengembangan fasilitas umum (toilet, dan lain-lainl);				
		d. pengembangan lokasi/area parkir sepeda; dan				
		e. pengembangan jalur khusus sepeda.				
		f. Pengembangan kawasan Jalan Margo Utomo sebagai perluasan kawasan Malioboro				
17.	Mengembangkan universitas dan sekolah sebagai Wisata	a. pengembangan pertunjukan kemahasiswaan berbasis budaya ;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	pendidikan.	b. pengembangan kualitas kawasan sekitar kampus sebagai Daya Tarik Wisata; dan				bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		c. pengembangan paket Wisata edukasi antar kampus.				
		d. peningkatan kualitas mutu pendidikan, dengan tidak melakukan pembatasan dalam format dan bentuk pendidikan				
18.	Revitalisasi Gembira Loka sebagai Wisata pendidikan fauna dan rekreasi keluarga.	a. penataan lansekap kawasan berbasis ramah lingkungan;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan even berbasis keluarga dan budaya secara rutin;				
		c. pengembangan atraksi baru berbasis keluarga; dan				
		d. renovasi kandang dan lingkungan kebun binatang.				
20.	Mengembangkan Ngasem – Ngabean sebagai kampung Wisata kuliner dan kerajinan	a. pengembangan paket jejaring kampung Wisata;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan area kuliner;				
		c. pengembangan bazaar kerajinan lokal dan kuliner; dan				
		d. pengembangan area workshop kerajinan lokal.				
		e. pengembangan pasar satwa dan tanaman PASTY sebagai daya tarik wisata minat khusus bertema flora dan fauna				
21.	Mengembangkan taman Wisata kota sebagai ruang terbuka hijau	a. pengembangan taman Wisata sebagai area sosialisasi/interaksi, rekreasi, kreasi, pendidikan ; dan				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan fasilitas jalan raya (<i>street furniture</i>) berbasis ramah lingkungan.				
23.	Mengembangkan kesehatan, kebugaran dan kecantikan	a. pengembangan pusat kesehatan, kebugaran dan kecantikan tradisional; dan				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	tradisional sebagai Daya Tarik Wisata baru.	b. pengembangan paket Wisatakesehatan, kebugaran dan kecantikan tradisional.				bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
15	Mengembangkan Sindu Kusuma Edupark, Jogja Bay Edupark, dan Up Side Down World sebagai objek wisata buatan bersifat hiburan	a. Pengembangan wisata hiburan berbasis keluarga b. Pengembangan pusat kuliner di area wisata				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata

Arah Kebijakan 5 : Pengembangan Kasongan – Tembi – Wukirsari sebagai sentra kerajinan dan Wisata alam

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Kasongan sebagai kawasan desa Wisata kerajinan gerabah tradisional.	a. pengembangan paket Wisatadesa kerajinan; b. pengembangan display kerajinan Kasongan ; c. pengembangan even pameran kerajinan secara berkala;dan d. pengembangan suasanakawasan Kasongan dengan konsep desa Wisata kerajinandengan pemanfaatan berbagai macam unsur – unsur budaya lokal.				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
2.	Mengembangkan Gabusan – Manding – Tembi sebagai kawasan budaya dan kerajinan	a. pengembangan paket Wisatadesa kerajinan; b. pengembangan Wisata Pendidikan batik; c. pengembangan even musik tradisional dan modern (jazz, country, ethnic); d. pengembangan even pertunjukan tradisional dan modern (wayang, tari-tarian dan lain-lainl); e. pengembangan paket Wisata kerajinan kulit;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		f. pengembangan pusat workshop kerajinan kulit; g. pengembangan display kerajinan kulit; h. pengembangan even pameran kerajinan secara berkala; dan i. pengembangan Gabusan sebagai pasar seni.				
3.	Mengembangkan Wukirsari sebagai kawasan desa Wisata penghasil kerajinan.	a. pengembangan paket Wisata desa Wisata kerajinan tangan; b. pengembangan suasana kawasan Wukirsari dengan konsep kerajinan; tangan dengan pemanfaatan berbagai macam unsur – unsur budaya lokal; dan c. pengembangan even dan bazar secara berkala.				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
4.	Mengembangkan Kebonagung sebagai desa Wisatapertanian tradisional.	a. pengembangan paket Wisata pedesaan desa Wisata kebonagung; b. pengembangan Rumah peristirahatan (homestay) tradisional yang representatif; c. pengembangan daya tarik kegiatan pertanian tradisional; dan d. pengembangan eventradisi tradisional secara berkala (merti bumi, dan lain-lain).				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
5.	Mengembangkan Goa Cerme sebagai kawasan Wisatasusur goa.	a. pengembangan Wisata susur goa di Goa Cerme; b. pengembangan even berbasis budaya dan cinderamata; c. pengembangan area berkemah; dan d. pengembangan ekowisata dengan konsep susur goa.				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
6.	Mengembangkan Makam Imogiri sebagai kawasan cagar	a. pengembangan kawasan sebagai sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	budaya dan Wisata ziarah Kerajaan Mataram.	<p>dan kawasan cagar budaya;</p> <p>b. pengembangan paket Wisata heritage;</p> <p>c. pengembangan even budaya dan religi secara berkala; dan</p> <p>d. pengembangan suasana kawasan Makam imogiri dengan konsep ziarah kerajaan mataram dengan pemanfaatan berbagai macam unsur – unsur budaya lokal.</p>				bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
7.	Mengembangkan Mangunan dan Hutan Pinus Imogiri sebagai wisata alam	<p>a. pengembangan desa Wisata Mangunan sebagai desa agrowisata;</p> <p>b. pengembangan area pusat buah di kawasan Mangunan;</p> <p>c. pengembangan area tracking untuk sepeda; dan</p> <p>d. pengembangan rest area dan kuliner tradisional.</p> <p>e. Pengembangan hutan wisata</p>				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
8.	Mengembangkan Pundong sebagai kawasan desa Wisata kerajinan gerabah.	<p>a. pengembangan paket Wisata desa kerajinan gerabah;</p> <p>b. pengembangan area workshop yang representatif; dan</p> <p>c. pengembangan area display kerajinan.</p>				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
9.	Mengembangkan Goa Selarong – Krebet sebagai kawasan Wisata sejarah dan Wisata kerajinan.	<p>a. pengembangan Wisata sejarak napak tilas;</p> <p>b. pengembangan agroWisata buah di Goa Selarong;</p> <p>c. pengembangan sentra kerajinan kayu;</p> <p>d. pengembangan area berkemah di Goa Selarong;</p> <p>e. pengembangan Wisata kerajinan batik kayu di Krebet; dan</p> <p>f. pengembangan bazar kerajinan dan even berbasis</p>				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		budaya.				
10.	Mengembangkan Bendung Tegal sebagai kawasan Wisata tirta dan olahraga .	a. pengembangan Wisata alam dan melihat pemandangan;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan even olahraga air (misal: perahu naga);				
		c. pengembangan Wisata mancing; dan				
		d. pengembangan Wisata perwasahan tradisional.				
11.	Mengembangkan Goa Jepang sebagai Wisata sejarah dan alam.	a. pengembangan Wisata sejarah Perang Dunia II;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan even berbasis budaya;				
		c. pengembangan Wisata alam; dan				
		d. pengembangan Wisata pendidikan dan penelitian.				
12.	Mengembangkan kawasan Puncak Becici, Seribu Batu Songo Langit, dan Puncak Panguk Dlingo sebagai kawasan wisata alam	a. pengembangan Wisata alam dan melihat pemandangan;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan CBT dikawasan Dlingo dan sekitarnya;				
		c. Pengembangan event berbasis budaya				

Arah Kebijakan 6 : Pengembangan Parangtritis – Depok – Kuwaru sebagai Wisata alam, kuliner, dan dirgantara

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Revitalisasi Parangtritis sebagai kawasan Rekreasi Pantai Keluarga.	a. pengembangan area <i>boardwalk</i> berbasis ramah lingkungan;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan area bazar dan cinderamata; dan				
		c. pengembangan even budaya dan olahraga .				
2.	Mengembangkan Pantai	a. pengembangan Wisata kuliner hasil laut;				Organisasi perangkat



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	Depok sebagai kawasan Wisata kuliner hasil laut dan dirgantara.	b. pengembangan area bazar dan cinderamata; dan c. pengembangan atraksi paralayang, gantole dan atraksi kedirgantaraan.				daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
5.	Mengembangkan Gumuk Pasir Barchans sebagai kawasan konservasi geospasial dan cagar biosfer .	a. pengembangan Wisata Pendidikan <i>geospatial di</i> Gumuk Pasir Barchans; b. pengembangan Wisata pendidikan museum Gumuk Pasir Barchans; c. pengembangan cagar biosfer Gumuk Pasir Barchans; dan d. pengembangan Wisata susur Gumuk Pasir.				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
6.	Mengembangkan Pantai Kuwaru – Goa Cemara – Samas – Pantai Baru sebagai kawasan Wisata pantai keluarga dan pendidikan.	a. pengembangan Wisata susur pantai; b. pengembangan tambak udang sebagai agrowisata di radius yang aman dengan bibir pantai; c. pengembangan pasar dan kuliner hasil laut; d. pengembangan area konservasi cemara udang; e. pengembangan rumah peristirahatan (<i>lodge</i>) berbasis alam; f. pengembangan Wisata pendidikan berbasis energi terbarukan; dan g. pengembangan ekoWisatapendidikan mangrove di kawasan pantai Baros.				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
8.	Pantai Goa Cemara sebagai kawasan Wisata konservasi penyu	a. Pengembangan wisata konservasi b. Fasilitasi pengembangan kawasan konservasi dan perlindungan penyu c. Pengembangan wisata edukasi konservasi penyu				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang konservasi sumber daya alam



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
11.	Mengembangkan Parangkusumo sebagai kawasan Ritual Budaya Laut	a. pengembangan even budaya dan olahragasecara berkala; dan				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
		b. pengembangan suasana kawasan Parangkusumo dengan berbasis budaya dengan pemanfaatan unsur – unsur religi masyarakat sekitar.				

Arah Kebijakan 7: Pengembangan Pantai Baron – Pantai Sundak sebagai kawasan Wisata Pantai Berbasis Pendidikan dan Keluarga

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Pantai Baron sebagai pantai rekreasi keluarga dan kuliner hasil laut.	a. pengembangan Wisata kuliner hasil laut;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
		b. pengembangan Wisata petualangan dengan mengembangkan aktivitas luar ruangan dan olahraga, berupa kegiatan susur pantai;				
		c. pengembangan zonasi dan penataan lanskap desa Wisata pantai ;				
		d. pengembangan aktifitas menikmati pemandangan;				
		e. pengembangan even seni dan budaya secara berkala;				
		f. pengembangan area <i>boardwalk</i> berbasis ramah lingkungan; dan				
		g. pengembangan area bazar dan cinderamata tepian pantai.				
2.	Mengembangkan Pantai Krakal sebagai kawasan	a. pengembangan pasar ikan hias dan cinderamata;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang
		b. pengembangan aktifitas menikmati pemandangan;				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	Wisata berbasis konservasi sumberdaya alam	c. pengembangan aktivitas luar ruangan dan olahraga;				bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		d. pengembangan eco resort; dan				
		e. pengembangan area penelitian dan konservasi terumbu karang.				
3.	Mengembangkan Pantai Sundak sebagai kawasan Wisata pantai dan relaksasi.	a. pengembangan Wisata petualangan dengan mengembangkan aktivitas luar ruangan dan olahraga, berupa kegiatan susur pantai, berkemah;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan zonasi dan penataan lanskap desa Wisata pantai di kawasan Pantai Sundak; dan				
		c. pengembangan kuliner laut.				
4.	Mengembangkan Pantai Kukup sebagai kawasan Wisata pantai berbasis konservasi terumbu karang	a. pengembangan aktifitas menikmati pemandangan;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan Wisata susur tepian pantai; dan				
		c. pengembangan Wisata pendidikan terumbu karang.				
5.	Mengembangkan Pantai Ngrenehan – Pantai Gesing sebagai kawasan Wisata berbasis pasar dan perdagangan ikan.	a. pengembangan Wisata aktifitas nelayan tradisional;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan dan penataan pasar ikan; dan				
		c. pengembangan Wisata kuliner hasil laut.				
7.	Mengembangkan Pantai Ngobaran sebagai kawasan Wisata pantai berbasis budaya tradisional.	a. pengembangan even budaya dan religi secara berkala;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan paket Wisata sejarah dan religi;				
		c. pengembangan aktifitas menikmati pemandangan; dan				
		d. pengembangan Wisata kuliner hasil laut.				
9.	Mengembangkan Pantai Sepanjang sebagai kawasan Wisata pantai tropis alami.	a. pengembangan Wisata susur pantai;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di
		b. pengembangan aktivitas luar ruangan dan olahraga ;				
		c. Pengembangan Wisata kuliner hasil laut;				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		d. pengembangan desa Wisata berbasis aktifitas pertanian tradisional;				bidang Kepariwisata
		e. pengembangan rumah peristirahatan (<i>homestay</i>) di desa Wisata; dan				
		f. pengembangan Ekowisata Pantai sebagai upaya meningkatkan daya tarik sekaligus konservasi pantai.				
8.	Pantai Pulang Syawal, Pantai Sandranan, Pantai Drini, Pantai Pok Tunggal, Snorkling, Gondola Pantai Timang	a. pengembangan wisata pantai yang aman dan nyaman				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengelolaan kegiatan wisata bawah laut				
		c. sertifikasi pemandu wisata				

Arah Kebijakan 8: Pengembangan Pantai Siung – Pantai Wediombo – Pantai Sadeng sebagai kawasan Wisata berbasis keanekaragaman pantai karst

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Pantai Siung sebagai kawasan Wisata minat khusus.	a. pengembangan Wisata petualangan dengan mengembangkan aktivitas luar ruangan olahraga, berupa kegiatan panjat tebing dan susur pantai;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan aktifitas menikmati pemandangan;				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		c. pengembangan even seni dan budaya secara berkala;				
		d. pengembangan area <i>boardwalk</i> berbasis ramah lingkungan;				
		e. pengembangan area bazar dan cinderamata tepian pantai; dan				
		f. pengembangan kawasan kuliner tepian pantai.				
2.	Mengembangkan pantai Wediombo sebagai kawasan Wisata pantai berbasis konservasi dan relaksasi	a. pengembangan Wisata petualangan dengan mengembangkan aktivitas luar ruangandan olahraga, berupa kegiatan susur pantai dan konservasi;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan zonasi dan penataan lanskap desa Wisata pantai;				
		c. pengembangan atraksi seni dan budaya;dan				
		d. pengembangan suasanakawasan pantai Wediombo dengan konsep Wisata konservasi dan rileksasidengan pemanfaatan berbagai macam unsur – unsur alam dan budaya lokal.				
3.	Mengembangkan Pantai Sadeng sebagai kawasan Wisatapelabuhan perikanan	a. pengembangan Wisata mancing laut;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan Wisata jelajah pedesaan nelayan dan tepian pantai berbasis budaya;dan				
		c. pengembangan suasanakawasan Pantai Sadeng dengan Wisata desa tradisionaldengan pemanf aatan berbagai macam unsur – unsur alam dan budaya lokal.				
4.	Mengembangkan Bengawan Solo Purba sebagai kawasan Wisata	a. pengembangan Wisata pendidikan dan penelitian;dan				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan agrowisata.				

Arah Kebijakan 9 : Pengembangan Patuk sebagai kawasan desa Wisata kerajinan dan agro-ekoWisata



Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan desa Wisata Bobung sebagai kawasan desa Wisata kerajinan Kayu Batik	a. pengembangan rumah peristirahatan (<i>homestay</i>) di desa Wisata;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan zonasi desa Wisata Bobung sebagai upaya menciptakan pengalaman kunjungan;				
		c. pengembangan Wisata edukasi kerajinan di bobung ;				
		d. pengembangan pertunjukan seni dan budaya secara berkala;				
		e. pengembangan suasanakawasan desa Wisata Bobung dengan memasukkan berbagai macam unsur – unsur alam dan budaya lokal;				
		f. pengembangan paket desa Wisata Bobung dengan mengembangkan program hidup di desa Bobung (<i>Live – In</i>);dan				
		g. pengembangan area bazar dan cinderamata.				
2.	Mengembangkan Ekowisata Hutan Bunder dan Wanagama sebagai kawasan Wisata pendidikan, dan Wisata berbasis aktivitas luar ruangan.	a. pengembangan ekowisata dengan paket Wisata susur hutan Bunder dan Hutan Wanagama;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan zonasi dan penataan lanskap Hutan Bunder dan Wanagama;				
		c. pengembangan sarana pendidikan dan penelitian;				
		d. pengembangan Wisataluar ruangan yang representatif;dan				
		e. pengembangan perkemahandi sekitar area Hutan Bunder dan Wanagama;				
3.	Mengembangkan Gunung Nglangeran sebagai kawasan Wisata ekologi dan	a. pengembangan Wisata jelajah, perkemahan, dan bersepeda sebagai Wisata petualangan;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di
		b. Sertifikasi pemandu				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	agrowisata.	c. pengembangan area kebun buah dan sentra buah; d. pengembananan zonasi kawasan Gunung Nglanggeran untuk kegiatan Wisata petualangan berbasis alam; dan e. pengembangan rumah peristirahatan (<i>lodge</i>) dan perkemahan berbasis alam di Gunung Nglanggeran.				bidang Kepariwisataaan
4.	Green Village Gedangsari, Embung Nglanggeran, Embung Batara Sriten, Desa Wisata Jelok	a. pengembangan wisata alam Ngelangeran b. Sertifikasi pemandu wisata c. Sertifikasi produk coklat Ngelangeran d. Pengembangan homestay e. Pengembangan event kebudayaan disekitar kawasan embung				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan

Arah Kebijakan 10 : Pengembangan Karst Pegunungan Sewu sebagai kawasan Wisata berbasis goa karst

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Kalisuci (Goa Glatikan, Goa Gelong, Goa Buriomah, Goa Pindul, Goa Grubug dan Goa Jomblang) sebagai kawasan Wisataminat khusus	a. Pengembangan Wisata susur Goa dengan rute Goa Glatikan, Goa Gelong, Goa Buriomah, Goa Pindul, Goa Grubug dan Goa Jomblang; b. pengembangan aktifitas menikmati pemandangan; c. pengembanganeven budaya secara berkala; d. pengembangan penginapan berbasis alam; dan				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		e. pengembanganWisata pendidikan berbasis Goa (speleologi) di sekitar kawasan Karst.				
2.	Mengembangkan Goa Bribin – Goa Grubug sebagai kawasan Wisata susur Goa Karst keluarga.	a. Pengembangan aktifitas menikmati pemandangan; b. Pengembangan Wisata susur Goa di Goa Bribin – Goa Grubug; dan c. Pengembangan <i>lodge</i> di sekitar Goa Bribin – Goa Grubug.				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
5.	Mengembangkan Goa Rancang Kencono – Air Terjun Sri Gethuk sebagai kawasan Wisata ziarah.	a. pengembanganWisata ziarah dan sejarah/ napak tilas; b. pengembanganWisata susur Goa pemula; c. pengembangan even berbasis budaya;dan d. pengembangan area kuliner tradisional.				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
9.	Mengembangkan Embung Jelangprong senagai kawasan wisata	a. Pengembangan wisata alam di kawasan embung b. Pengembangan even berbasis budaya c. Pengembangan kuliner tradisioanl				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata

Arah Kebijakan 11 : PengembanganCongot – Glagah – Trisik sebagai kawasan Wisata kuliner dan tradisional pantai

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Glagah sebagai kawasan Wisataminat khusus, pantai dan	a. pengembanganWisata petualangan dengan mengembangkan aktivitas seperti olahraga dan aktifitas luar ruangan;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	agrowisata.	b. pengembangan agrowisata dan; c. pengembangan Wisata industri ikan dan kuliner hasil laut; d. pengembangan even budaya dan olahraga (layang-layang, motorcross dll) secara berkala; e. pengembangan area <i>boardwalk</i> berbasis ramah lingkungan; f. pengembangan area bazar dan cinderamata tepian pantai; dan g. pengembangan kawasan kuliner ikan tepian pantai; h. pengembangan prahu wisata pantai Glagah; i. pengembangan hutan mangrove pasir mendit;				bidang Kepariwisata
4.	Mengembangkan Trisik sebagai kawasan Desa Wisata pesisir pantai.	a. pengembangan Wisata jelajah tepian pantai; b. pengembangan Wisata dengan mengembangkan aktivitas seperti olahraga dan aktifitas luar ruangan; c. pengembangan zonasi dan penataan lanskap desa Wisata pantai di kawasan Trisik; dan d. pengembangan even budaya dan olahraga secara berkala.				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
5.	Mengembangkan Pelabuhan Karangwuni sebagai kawasan desa Wisata.	a. pengembangan Wisata mancing laut; b. pengembangan even budaya dan olahraga secara berkala; dan c. pengembangan Wisata perikanan dan tepian pantai berbasis budaya.				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
7.	Mengembangkan kawasan Congot sebagai kawasan	a. pengembangan Wisata perikanan dan tepian pantai berbasis budaya;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB	
			I	II	III		
	Wisata alam keluarga.	b. pengembangan kawasan kuliner ikan tepian pantai; c. pengembangan area bazar dan cinderamata tepian pantai; dan d. pengembangan even budaya dan olahraga secara berkala.				bertanggung jawab di bidang Kepariwisata	
11.	Mengembangkan kawasan Giriloyo sebagai kawasan Wisata ziarah.	a. pengembangan Wisata ziarah;					Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. pengembangan area bazar dan cinderamata ; dan					
		c. pengembangan even budaya secara berkala.					

Arah Kebijakan 12 : Pengembangan Pegunungan Menoreh sebagai kawasan Wisata berbasis tirta, religi, dan desa Wisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB	
			I	II	III		
1.	Mengembangkan Waduk Sermo sebagai area Wisata air, Wisata luar ruangan, dan olahraga.	a. pengembangan Wisata petualangan dengan mengembangkan aktivitas luar ruangan dan olahraga, berupa kegiatan susur waduk; b. pengembangan aktifitas menikmati pemandangan; c. pengembangan perkemahan di sekitar area waduk; d. pengembangan Wisata peristirahatan (<i>second home tourism</i>) dengan mengembangkan <i>lodge</i> serta kegiatan Wisata waduk pada kawasan Waduk sermo seperti Wisata memancing, olahraga kano, dan kayak; dan e. pengembangan even perahu naga dan even budaya secara rutin.				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata	
2.	Mengembangkan Kalibiru sebagai kawasan desa Wisata.	a. pengembangan dan renovasi eco-lodge yang representatif;					Organisasi perangkat daerah (OPD) yang



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		b. pengembangan area Wisata luar ruangan dan penjelajahan ;dan				bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
		c. pengembangan even seni budaya tradisional masyarakat secara berkala.				
5.	Revitalisasi Goa Kiskendo sebagai kawasan Wisata alam	a. pengembangan aktifitas menikmati pemandangan;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
		b. pengembangan even seni dan budaya secara berkala;				
		c. pengembangan area cinderamata;dan				
		d. pengembangan efek pencahayaan buatan untuk mendukung pengalaman Wisata di Goa kiskendo.				
9.	Mengembangkan Sentolo – Lendah- sebagai kawasan desa Wisata.	a. pengembangan paket desa Wisata berbasis budaya;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
		b. pengembangan even seni budaya tradisional masyarakat secara berkala;dan				
		c. pengembangan rumah peristirahatan (<i>homestay</i>).				
12.	Mengembangkan Pendoworejo sebagai kawasan desa Wisata budaya.	a. pengembangan <i>live-in</i> ;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
		b. pengembangan rumah peristirahatan (<i>homestay</i>);				
		c. pengembangan agroWisata peternakan;				
		d. pengembangan Wisata pendidikan pembibitan sapi;dan				
		e. pengembangan even berbasis budaya.				
17.	Mengembangkan Goa Sriti sebagai kawasan Wisata alam dan sejarah	a. pengembangan Wisata susur Goa;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
		b. pengembangan jalur jelajah;dan				
		c. pengembangan Wisata sejarah.				
20.	Mengembangkan kawasan Banjarasri, Banjaroyo dan Ancol sebagai kawasan agroWisata dan desa Wisata.	a. pengembangan aktifitas menikmati pemandangan;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
		b. pengembangan paket desa agrowisata;				
		c. pengembangan rumah peristirahatan (<i>homestay</i>);				
		d. revitalisasi kawasan Banjaroyo pasca bencana;				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		e. pengembangan Pasar Mbendhok sebagai <i>rest area</i> ; dan f. pengembangan area bazar dan cinderamata.				
23.	Mengembangkan Nglinggo sebagai desa Wisata alam.	a. pengembangan Wisata tinggal di desa (<i>live-in</i>); b. Pengembangan agrowisata kebun teh; dan c. pengembangan even berbasis budaya.				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
26.	Mengembangkan Puncak Suroloyo sebagai kawasan Wisata alam.	a. pengembangan paket Wisataziarah; b. pengembangan agroWisata bunga; c. pengembangansuasanakawasan Puncak Suroloyo berbasis budayadengan pemanfaatan berbagai macam unsur – unsur alam dan budaya lokal; d. pengembangan even seni dan budaya secara berkala ; dan e. pengembangan area bazar dan cinderamata.				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
28.	Mengembangkan Sendangsono sebagai kawasan Wisata ziarah	a. pengembangan paket Wisatareligi; b. pengembanganWisata jalan salib; dan c. pengembanganeven budaya dan religi secara berkala .				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
29.	Nanggulan-Pengasih sebagai kawasan Wisata kerajinan	a. Fasilitasi pengembangan kerajinan pada masyarakat b. pengembangan paket Wisatakerajinan c. Pengembangan desa wisata kerajinan d. Pengembangan jejaring wisata kerajinan				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
33.	Mengembangkan Kalibawang sebagai kawasan sentra agrowisata buah.	a. pengembangan Wisata taman buah; b. pengembangan area pendidikan (pembibitan, pemeliharaan, pemanenan); dan c. pengembangan pasar buah.				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
36.	Mengembangkan Kebuh Teh	a. Pengembangan wisata alam perkebunan				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	Tritis sebagai wisata agro	b. Pengembangan wisata pendidikan berbasis kebun teh				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		c. Pengembangan homestay				
		d. Mengembangkan kegiatan outbond keluarga				
		e. Pengembangan event wisata dan budaya				
37.	Mengembangkan air terjun sedut dan air terjun kembang soka, serta taman sungai mudal	a. Mengembangkan wisata alam				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Pengembangan event wisata dan budaya				
		c. Pengembangan wisata kuliner lokal khas				

C. FASILITAS KEPARIWISATAAN

Arah Kebijakan 1: Pembangunan Fasilitas Kepariwisata Dalam Mendukung Perintisan Pengembangan Kawasan Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan kawasan Pariwisata.	a. fasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha Pariwisata dengan nilai kompetitif;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah
		b. fasilitasi kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha Pariwisata; dan				
		c. fasilitasi kemudahan pinjaman bank dengan suku bunga yang rendah bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha Pariwisata.				
4.	Meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan fasilitas pendukung Pariwisata atas inisiatif swasta.	a. peningkatan penyiapan fasilitas umum fisik dasar (jar. listrik dan penerangan, jar. telekomunikasi, jar. air bersih, sistem pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investor; dan				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah
		b. peningkatan pembukaan lahan baru bagi investor untuk				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		membangun Fasilitas Kepariwisataaan.				
6.	Merintis dan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan kawasan Pariwisata dan meningkatkan daya saing kawasan Pariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> a. fasilitas perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di kawasan Pariwisata; b. fasilitasi perintisan pembangunan jaringan air bersih di kawasan Pariwisata; c. fasilitasi pembangunan jaringan telekomunikasi di kawasan Pariwisata; d. fasilitasi penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata di kawasan Pariwisata; e. peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata di kawasan Pariwisata; f. penyediaan kios kelontong dan obat yang melayani selama 24 jam di kawasan Pariwisata; g. penyediaan rambu-rambu Pariwisata di kawasan Pariwisata; h. penyediaan <i>E-Tourism</i> di kawasan Pariwisata; i. penyediaan tempat penukaran uang (<i>money changer</i>) di kawasan Pariwisata; j. penyediaan loker umum di kawasan Pariwisata; k. penyediaan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) di kawasan Pariwisata yang rawan bencana; l. penyediaan fasilitas khusus bagi difable, anak-anak, dan lanjut usia di kawasan Pariwisata; m. penyediaan fasilitas olah raga di kawasan Pariwisata; n. penyediaan fasilitas bermain anak-anak di kawasan Pariwisata; 				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		o. penyediaan fasilitas pedestrian di kawasan Pariwisata; p. penyediaan lahan parkir di kawasan Pariwisata; q. penyediaan telepon umum di kawasan Pariwisata; r. penyediaan toilet umum di kawasan Pariwisata; s. penyediaan fasilitas warnet di kawasan Pariwisata; t. penyediaan ATM di kawasan Pariwisata; u. penyediaan fasilitas laundry di kawasan Pariwisata; v. penyediaan tempat sampah di kawasan Pariwisata; w. penyediaan klinik kesehatan yang beroperasi selama 24 jam di kawasan Pariwisata; dan x. pengembangan jalur hijau sebagai penunjang pembangunan Kepariwisata.				
7.	Merintis dan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas umum fisik dasar untuk memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata permuseuman berbasis budaya dan sejarah.	a. peningkatan dan pengembangan fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Inovasi manajemen Daya Tarik Wisata museum; b. peningkatan dan pengembangan fasilitas Kepariwisata berbasis teknologi audio visual yang atraktif dan inovatif dalam rangka modernisasi museum; dan c. peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar museum untuk meningkatkan kualitas kegiatan Kepariwisata berbasis museum.				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah

Arah Kebijakan 2: Peningkatan Kualitas Fasilitas Kepariwisata Yang Mendorong Pertumbuhan, Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Kawasan Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	berbagai skema kemitraan antara pemerintah Daerah dan swasta	a. pengembangan skema regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan Fasilitas Kepariwisata di kawasan Pariwisata; dan				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah
		b. peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan Fasilitas Kepariwisata di kawasan Pariwisata.				
2.	berbagai skema kemandirian pengelolaan	a. pemberian kemandirian peran dan tanggung jawab kepada otoritas pengelola kawasan Pariwisata yang sudah mapan dalam pengembangan Fasilitas Kepariwisata; dan				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah
		b. pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah secara otonom dalam pengelolaan pengembangan Fasilitas Kepariwisata pada kawasan Pariwisata yang sudah berkembang .				
3.	Fasilitas Kepariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus	a. evaluasi seluruh Fasilitas Kepariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus (<i>difable</i>); dan				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah
		b. pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah secara otonom dalam pengelolaan pengembangan fasilitas umum, fasilitas umum fisik dasar, dan fasilitas Pariwisata pada destinasi Pariwisata yang sudah berkembang .				

Arah Kebijakan 3: Pengendalian Pembangunan Fasilitas Kepariwisata Bagi Kawasan – Kawasan Pariwisata Yang Sudah Melampaui Ambang Batas Daya Dukung

Arah Kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	mengembangkan regulasi pembatasan perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan	a. pengembangan skema pembatasan pembangunan Fasilitas Kepariwisata pada kawasan Pariwisata dalam rangka menjaga keberlanjutan daya dukung ;dan				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah
		b. koordinasi perijinan pembangunan Fasilitas Kepariwisata pada kawasan Pariwisata untuk menjaga keberlanjutan daya dukung suatu kawasan Pariwisata.				
2.	menegakkan peraturan perundang - undangan	a. pengembangan skema insentif dan disinsentif dalam pembangunan Fasilitas Kepariwisata pada kawasan Pariwisata;dan				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah
		b. peningkatan peran dan tanggung jawab swasta dalam pemeliharaan Fasilitas Kepariwisata pada kawasan Pariwisata.				
3.	meningkatkan penerapan disinsentif untuk pembangunan fasilitas Pariwisata	a. pencabutan ijin bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan pembangunan Fasilitas Kepariwisata;dan				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah
		b. penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan pembangunan Fasilitas Kepariwisata.				

Arah Kebijakan 4 : Pembangunan Fasilitas Kepariwisata Dalam Mendukung Perintisan Pengembangan Lereng Merapi Bagian Selatan Sebagai Kawasan Wisata Alam Gunung Merapi dan Desa Wisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung kawasan jelajah Merapi - Cangkringan	a. pembangunan dan penataan rute Wisata lava tour;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan
		b. pembangunan sarana interpretasi: <i>sign and posting</i> di area Wisata;				
		c. pembangunan gardu pandang dan gazebo untuk				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	(Kaliadem) - Hutan Wisata Kaliurang sebagai kawasan Wisata gunung berapi	menunjang aktivitas melihat pemandangan alam;				umum
		d. pembangunan <i>rest area</i> di sekitar jalur jelajah dan bersepeda ;				
		e. pembangunan fasilitas parkir dan sarana MCK;				
		f. penataan rute Wisata Kalikuning-kaliadem-kaliurang;				
		g. pembangunan area Wisata ziarah Kinahrejo ;				
		h. pembangunan fasilitas parkir dan sarana MCK di sekitar area ziarah Kinahrejo;				
		i. pembangunan <i>view point</i> dengan menambahkan <i>shelter – shelter</i> di area sepanjang jalur jelajah Merapi-Cangkringan-Hutan Wisata Kaliurang dalam menunjang aktivitas menikmati pemandangan alam;dan				
	j. penanaman vegetasi pengarah di area ziarah Kinahrejo.					
2.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebagai Taman Nasional Gunung Merapi	a. penataan zonasi pemanfaatan kawasan TN Gunung merapi dengan membagi zona rekreasi dan zona konservasi;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. pembangunan sarana interpretasi berupa <i>sign and posting</i> ;				
		c. pembangunan dan penataan area Wisata susur hutan dan ekoWisata di Taman Nasional Gunung Merapi;				
		d. pembangunan area Wisata pendidikan geografi dan geologi (<i>geotourism</i>);				
		e. pembangunan <i>Tourist Information Center</i> ;				
		f. pembangunan gardu pandang dan gazebo;				
		g. pembangunan <i>rest area</i> di titik sepanjang area jelajah;dan				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		h. pembangunan lokasi perkemahan.				
3.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Museum Gunung Merapi sebagai kawasan Wisata Pendidikan Gunung Merapi	<p>a. penataan area display diorama kegunungapian yang representatif untuk Wisata pendidikan kebencanaan gunungapi, gempabumi dan bencana lain di museum Merapi;</p> <p>b. pembangunan sarana interpretasi dan pendidikan museum berupa atraksi, replika, dan <i>audiovisual</i> yang dapat secara dinamis menggambarkan kawasan Gunung Merapi kepada Wisatawan;</p> <p>c. penataan efek pencahayaan artivisual (<i>lighting effect</i>) pada display di museum Gunung Merapi dengan memperkuat daya tarik guna mendukung kepuasan pengalaman pengunjung ;</p> <p>d. pembangunan fasilitas untuk Wisata pengamatan satwa (<i>bird watching</i>) dalam bentuk titik pandang, rest area, jembatan gantung; dan</p> <p>e. penataan area display museum sebagai tempat pementasan (<i>venue</i>) pertunjukan seni dan budaya.</p>				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
8.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung kawasan Ulen Sentalu sebagai kawasan pendidikan, budaya dan sejarah	<p>a. pembangunan area even (panggung, area pameran, catwalk, theater dll);</p> <p>b. pembangunan area audio visual;</p> <p>c. pembangunan area kuliner tradisional Jawa; dan</p> <p>d. pembangunan taman bermain.</p>				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
12.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung desa - desa di kawasan Gunung Merapi	<p>a. pembangunan dan penataan <i>boardwalk</i> sebagai rute untuk Wisata agro dengan kegiatan Wisata petik buah;</p> <p>b. penataan vegetasi dan lansekap desa Wisata agro;</p> <p>c. pembangunan <i>rest area</i> dan <i>gazebo</i> di desa-desa di</p>				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	sebagai Kawasan Rantai Desa Wisata	kawasan Turi;				umum
		d. pembangunan sarana parkir dan MCK ;				
		e. pembangunan sarana interpretasi Agro Wisata dengan <i>sign posting</i> yang menggambarkan klasifikasi jenis tanaman;				
		f. pembangunan rute Wisata jelajah desa dan pengamatan kegiatan budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat lokal (<i>fieldtrip</i>);				
		g. pembangunan rumah peristirahatan berbasis alam(<i>ecolodge</i>)atau rumah peristirahatan (<i>homestay</i>)untuk mendukung kegiatan jelajah desadi kawasan Pakem, Ngaglik, Ngemplak;				
		h. pembangunan area Wisata pendidikan budaya (belajar tari, wayang, batik dsb)berupa pendopo, padepokan dan sebagainya;				
		i. pembangunan lokasi fotountukaktivitas fotografi di sekitar kawasan Pakem, Ngaglik, Ngemplak;				
		j. pembangunan <i>Tourist Information Center</i> ;				
		k. pembangunan fasilitas umum (air bersih, listrik dan telekomunikasi);dan				
		l. pembangunandan penataan titik pandang (<i>view point</i>) dalam bentuk atraksi, <i>sculpture</i> , pada area desa Wisata untuk menunjang aktivitas melihat pemandangan alam.				
24.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisataan dalam mendukung kawasan Pesona Alam Gunung Merapi di	a. pembangunan area wisata di kawasan cangkringan;				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan
	b. pembangunan gazebo dan gardu pandang untuk mendukung kegiatan melihat pemandangan alamdi kawasan cangkringan;					



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	kawasan Cangkringan	c. penataan vegetasi;				umum
		d. pembangunan fasilitas umum (air bersih, listrik dan telekomunikasi);				
		e. pembangunan sarana parkir dan mck;dan				
		f. penataan zonasi kawasan.				

Arah Kebijakan 5: Peningkatan Kualitas Fasilitas Kepariwisata Yang Mendorong Pertumbuhan, Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Prambanan – Ratu Boko Sebagai Kawasan WisataPurbakaladan Budaya

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung kawasan Candi Prambanan, Sendratari Ramayana, serta Gedung Kesenian Trimurti sebagai tempat pertunjukan Budaya Jawa	a. Pembangunan sarana dan fasilitas pertunjukan seni budaya lokal				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan <i>Tourist Information Center</i> yang representatif lengkap dengan papan-papan informasi mengenai obyek guna mendukung kenyamanan dan kepuasan kegiatan Wisata				
		c. Penataan dan pengaturan area cinderamata di sekitar kompleks Prambanan untuk mendukung keindahan dan suasana Wisata yang baik.				
		d. Pembagunan sarana interpretasi dengan <i>sign and posting</i> diarea kawasan				
		e. Pengadaan vegetasi di sekitar area Kompleks				
		f. Pembangunan area kuliner tradisional				
		g. Penataan sistem pencahayaan pada malam hari				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
2.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung kawasan Situs Kraton Ratu Boko sebagai Wisata Candi peninggalan Kerajaan Boko	a. Pengadaan rute Wisata jelajah candi				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan sarana interpretasi dengan <i>sign and posting</i> di sekitar kawasan Situs Kraton Ratu Boko dalam menunjang aktivitas melihat pemandangan alam				
		c. Pembangunan area kuliner tradisional dengan konsep terbuka				
		d. Penataan dan pengaturan area cinderamata				
		e. Pengadaan sistem pencahayaan pada malam hari				
3.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung situs - situs candi di sekitar candi Kalasan, candi Prambanan, dan Kraton Ratu Boko sebagai kawasan Wisata berbasis budaya hindu dan budaya budha	a. Pembangunan rute untuk Wisata jelajah situs-situs candi di sekitar Kompleks Candi Kalasan, Candi Prambanan, dan Situs Kraton Ratuboko				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan rest area dan shelter				
		c. Pembangunan Gazebo dan Gardu Pandang				
		d. Pengadaan vegetasi untuk menambah kenyamanan lingkungan kawasan situs-situs di sekitar candi				
		e. Pembangunan dan penataan kuliner tradisional di kawasan situs candi				

Arah Kebijakan 6 : Peningkatan Kualitas Fasilitas Kepariwisata Yang Mendorong Pertumbuhan, Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Godean – Moyudan sebagai kawasan Wisatapedesaan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Sumberrahayu	a. Pengembangan dan penataan area <i>workshop</i>				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di
		b. Pengembangan area bazar dan even				
		c. Pengembangan rumah peristirahatan (<i>homestay</i>)				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	sebagai kawasan desa Wisata kerajinan tenun	d. Pembangunan fasilitas umum (air bersih, listrik dan telekomunikasi)				bidang pekerjaan umum
		e. Pembangunan <i>sign and posting</i>				
6.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Sidokarto sebagai desa Wisata budaya	a. Pengembangan rumah peristirahatan (<i>homestay</i>)				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pengembangan dan penataan area <i>workshop</i>				
		c. Pengembangan area bazar dan even				
		d. Pembangunan fasilitas umum (air bersih, listrik dan telekomunikasi)				
		e. Pembangunan <i>sign and posting</i>				
11.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Brajan sebagai kawasan desa Wisata kerajinan bambu	a. Pengembangan rumah peristirahatan (<i>homestay</i>)				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pengembangan area bazar dan even				
		c. Pembangunan fasilitas umum (air bersih, listrik dan telekomunikasi)				
		d. Pembangunan <i>sign and posting</i>				
15.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Kwagon sebagai desa Wisata budaya	a. Pengembangan rumah peristirahatan (<i>homestay</i>)				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pengembangan area bazar dan even				
		c. Pembangunan fasilitas umum (air bersih, listrik dan telekomunikasi)				
		d. Pembangunan <i>sign and posting</i>				

Arah Kebijakan 7 : Peningkatan Kualitas Fasilitas Kepariwisata Yang Mendorong Pertumbuhan, Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Kraton – Malioboro Sebagai Kawasan Wisata Berbasis Budaya dan Kehidupan Perkotaan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Fasilitas	a. Pembangunan fasilitas jalan raya (<i>street</i>				Organisasi perangkat



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	Kepariwisataan dalam mendukung Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Taman Sari, Museum Sonobudoyo dan Museum Kereta sebagai kawasan cagar budaya dan Wisata keraton	<i>furniture</i>)dikawasan				daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan <i>Tourist Information Center</i> yang representatif lengkap dengan papan-papan informasi mengenai obyek guna mendukung kenyamanan dan kepuasan kegiatan Wisata				
		c. Pembangunan pendopo untuk even budaya tradisionalatau upacara perayaan yang diadakan di sekitar kawasan Kompleks Kraton sebagai <i>venue</i> -nya seperti sekaten, topo bisu, grebeg syawal				
		d. Penyediaan sarana fasilitas umum (air bersih, listrik)				
		e. Penataan titik lokasi dan pengadaan efek cahaya artivisual di sekitar kawasan untuk memperkuat pengalaman ruang				
		f. Pengadaan sarana audiovisual yang menarik dan informatif di museum Sonobudoyo				
		g. Pengadaan fasilitas air bersih yang baik di taman sari sebagai upaya Revitalisasi sesuai dengan fungsi dan kondisi aslinya				
2.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisataan dalam mendukung Njeron Beteng sebagai kawasan Wisata budaya Jawa	a. Penataan titik area pemasanganpencahayaan buatan untuk mendukung kesan ruang				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
b. Pembangunan dan Penataan ruang display dan bazardi area Njeron Banteng yang terdiri kerajinan tangan khas lokal (<i>souvenirs</i> dan <i>handicraft</i>) serta workshop						
c. Pembangunan spot di area Njeron Beteng sebagai venue khusus untuk aktivitas fotografi						
d. Pembangunan sarana interpretasi dengan <i>sign and posting</i> dalam menunjang aktivitas melihat pemandangan alam						



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		e. Penataan area bekas pasar Ngasem sebagai area kuliner				
3.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Malioboro sebagai kawasan cagar budayadan koridor Wisata belanja	a. Penataan area kuliner pedagang kaki lima di kawasan Malioboro				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan sarana interpretasi dengan <i>sign and posting</i> dalam menunjang aktivitas Wisata belanja dan melihat pemandangan alam				
		c. Revitalisasi bangunan – bangunan komersial dengan arsitektur berbasis budaya				
		d. Pembangunan dan penataan area untuk festival malioboro sebagai festival tahunan				
		e. Pengadaan dan pemasangan ornamen yang menggunakan unsur – unsur budaya lokal pada fasilitas jalan raya (<i>street furniture</i>) malioboro				
		f. Penataan Malioboro dengan suasana koridor budaya jawa dengan pemanfaatan berbagai macam unsur – unsur budaya lokal khususnya image teknologi, dan kesenian				
		g. Pengadaan pencahayaan buatan				
		h. Penanaman vegetasi dan lanskap				
		i. Pembangunan <i>Community Center</i>				
4.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Ketandan dan sekitarnya sebagai kawasan kampung pecinan	a. Pembangunan dan penataan bangunan dengan langgam arsitektural cina				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan area kuliner khas pecinan				
		c. Pembangunan area bazar dan perbelanjaan berbasis budaya cina				
7.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam	a. Pengembangan kawasan sebagai sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	mendukung Ndalem Mangkubumen – Ndalem Pujokusuman – Puro Pakualaman sebagai kawasan Pertunjukan Kesenian Jawa	dan kawasan cagar budaya				bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Penataan sarana interpretasi, ornamen di Ndalem Pujokusuman dengan konsep Pertunjukan Kesenian Jawa				
		c. Penanaman vegetasi dan lansekap di Ndalem Pujokusuman				
		d. Penataan area untuk pertunjukan taruian Jawa di Puro Pakualaman				
		e. Revitalisasi bangunan Ndalem Pujokusuman-Puro Pakualaman				
		f. Pembangunan dan penataan area Wisataheritage di Ndalem Pujokusuman-Puropakualaman				
9.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Titik Nol sebagai kawasan Wisata Pendidikan, budaya, dan sejarah	a. Pembangunan dan penataan sarana interpretasi di area Wisata pendidikan dengan rute Taman Pintar – Benteng Vrederburg – Taman Budaya untuk mendukung Wisata pendidikan-kebudayaan				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Penataan lansekap di Taman Pintar – Benteng Vrederburg – Taman Budaya				
		c. Penataan fasilitas jalan raya (<i>street furniture</i>) di kawasan Taman Pintar – Benteng Vrederburg – Taman Budaya				
		d. Pembangunan area seni pertunjukan di sekitar kawasan Taman Pintar – Benteng Vrederburg – Taman Budaya				
10.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Kotagede sebagai kawasan cagar budaya	a. Pembangunan sarana interpretasi (audiovisual) dengan <i>sign and posting</i>				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Penataan ornamen kawasan dan fasilitas jalan raya (<i>street furniture</i>) dengan konsep kerajinan perakyang terdiri dari pemanfaatan berbagai macam unsur –				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
11.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung stadion Maguwaharjo – Candi Gebang – Embung Tambakboyo sebagai kawasan Wisata keluarga dan olahraga	unsur budaya lokal				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		c. Pembangunan area display dan bazar kerajinan perak khas lokal (<i>souvenirs and handicraft silver</i>)				
		a. Penanaman vegetasi dan lansekap				
		b. Pembangunan fasilitas <i>Wisata</i> luar ruangan seperti memancing, mini atv, dan lain sebagainya				
		c. Pembangunan shelter area pedagang kaki lima				
12.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Jalan Margo Utomo Mangkubumi sebagai kawasan Taman Sepeda	d. Pembangunan fasilitas area publik (peneduh, vegetasi, benches dll)				
		a. Pembangunan fasilitas <i>rest area</i> (benches, peneduh)				
		b. Pembangunan dan penataan ruang bazar kuliner di kawasan Margo Utomo				
		c. pembangunan fasilitas umum (toilet, dll)				
		d. Pembangunan lokasi/area parkir sepeda				
13.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung universitas dan sekolah di kawasan perkotaan sebagai Wisata pendidikan	e. Pembangunan jalur khusus sepeda				
		a. Pembangunan area gathering				
		b. Beautification kawasan sekitar kampus				
14.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Gembira Loka sebagai Wisata pendidikan fauna dan rekreasi keluarga	c. Pembangunan Edu Tourism Information Center				
		a. Pembangunan shelter dan rest area di kawasan dalam gembira loka				
		b. Beautification area kandang dan taman bermain				
		c. Pembangunan area flora di kawasan gembira loka				
		d. Pembangunan titik atraksi baru berbasis keluarga				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
15.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Ngasem – Ngabean sebagai kampung Wisata kuliner dan kerajinan	a. Penataan dan <i>beautification</i> area kampung Wisata				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan area kuliner				
		c. Pembangunan area bazaar kerajinan lokal dan kuliner				
		d. Pembangunan area workshop kerajinan lokal				
16.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung taman Wisata kota sebagai ruang terbuka hijau	a. Penataan dan penghijauan area taman				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan area rekreasi, kreasi, interaksi, adukasi				
		c. Pembangunan dan pemasangan fasilitas jalan raya (<i>street furniture</i>) berupa lampu taman, bangku taman, dan sebagainya				
17.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung mengembangkan kesehatan, kebugaran dan kecantikan tradisional sebagai Daya Tarik Wisata baru	a. Pembangunan area pusat pengobatan tradisional				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan signage menuju lokasi pengobatan				

Arah Kebijakan 8 : Pengembangan Fasilitas Kepariwisata dalam Mendukung Kawasan Kasongan – Tembi – Wukirsari Sebagai Sentra Kerajinan dan Wisata Alam

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Kasongan sebagai kawasan desa Wisata kerajinan gerabah tradisional	a. Pembangunan rute untuk mendukung paket Wisatadesa kerajinan				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Penataan display kerajinan Kasongan				
		c. Pembangunan area <i>workshop</i>				
		d. Pembuatan area pertunjukan				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		e. Pembangunan Fasilitas parkir dan MCK				
		f. Pembangunan area untuk Wisata pendidikan kerajinan				
2.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Gabusan – Manding – Tembi sebagai kawasan budaya dan kerajinan	a. Pembangunan rumah peristirahatan (<i>homestay</i>) atau <i>ecolodge</i> untuk Wisatawan di Tembi				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan fasilitas umum (air, listrik dan telekomunikasi)				
		c. Pembangunan area Wisata pendidikan Batik tembi				
		d. Pembangunan stage untuk area pertunjukan				
		e. Penataan suasana kawasan Tembi berbasis budaya dengan pemanfaatan berbagai macam unsur – unsur budaya lokal				
		f. Penataan display kerajinan Manding				
		g. Pembangunan area pusat workshop kerajinan kulit				
		h. Pembangunan <i>landmark</i> kawasan sebagai penanda kawasan				
		i. Revitalisasi kawasan Gabusan sebagai pasar seni				
4.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Wukirsari sebagai kawasan desa Wisata penghasil kerajinan	a. Penataan rute untuk paket Wisata kerajinan tangan				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Penataan suasana kawasan Wukirsari dengan konsep kerajinan tangan dengan pemanfaatan berbagai macam unsur budaya lokal				
		c. Pembangunan area <i>workshop</i>				
		d. Penataan area Wisata bazar kerajinan secara berkala				
5.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Kebonagung sebagai desa Wisata pertanian	a. Penataan dan renovasi bangunan rumah yang digunakan sebagai rumah peristirahatan (<i>homestay</i>)				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan
		b. Pembangunan sarana umum yang dapat memenuhi kebutuhan Wisatawan (air, telekomunikasi, listrik)				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	tradisional	c. Pembangunan sarana pangung budaya di kawasan desa Wisata				umum
6.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Goa Cerme sebagai kawasan Wisatasusur goa	a. Pembangunan pusat susur Goa di Goa Cerme				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembenahan jalan masuk menuju lokasi				
		c. Pembangunan area pemberhentian				
		d. Pembangunan dan penataan area ekoWisata				
		e. Pembangunan cinderamata				
		f. Pembangunan Fasilitas berkemah, parkir dan MCK				
		g. Pembangunan sarana umum (air, telekomunikasi, listrik)				
8.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Makam Imogiri sebagai kawasan cagar budaya dan Wisata ziarah Kerajaan Mataram	a. Pembangunan area Wisata budaya dan religi				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pengadaan vegetasi dan lansekaping				
		c. Pembangunan Fasilitas parkir dan MCK				
		d. Pembangunan fasilitas interpretasi berupa <i>sign and posting</i>				
		e. Pembangunan <i>Rest Area</i>				
9.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Mangunan sebagai kawasan agroWisata dan alam	a. Pembangunan fasilitas yang mewadai sebagai desa agroWisata Mangunan				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan area pusat buah di kawasan Mangunan				
		c. Pembangunan area tracking untuk sepeda				
		d. Pembangunan rest area dan kuliner tradisional				
13.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Pundong sebagai kawasan desa Wisata kerajinan gerabah	a. Pembangunan dan penataan jalan masuk desa Wisata				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan gerbang masuk yang mencerminkan ciri khas Pundong				
		c. Pembangunan area workshop yang representatif				
		d. Pembangunan area display kerajinan				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
17.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Goa Selarong – Kreet sebagai kawasan Wisata sejarah dan Wisata kerajinan	a. Pembangunan area Wisata kebun buah				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan area perkemahan				
		c. Penataan area sentra kerajinan				
		d. Pembangunan area workshop yang representatif				
		e. Pembangunan area display kerajinan				
22.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Bendung Tegal sebagai kawasan Wisata tirta dan olahraga	a. Pembangunan sarana kuliner				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan gazebo berbasis alam				
		c. Pembangunan Fasilitas parkir dan MCK				
		d. Pembangunan <i>sign and posting</i>				
26.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Goa Jepang sebagai Wisata sejarah dan alam	a. Pembangunan area kuliner				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan Fasilitas parkir dan MCK				
		c. Pembangunan <i>sign and posting</i>				

Arah Kebijakan 9 : Pembangunan Fasilitas Kepariwisata Yang Mendorong Pertumbuhan, Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Parangtritis – Depok – Kuwaru Sebagai Wisata Alam, Kuliner, dan Dirgantara

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Parangtritis sebagai kawasan Rekreasi Pantai Keluarga	a. Pembangunan dan penataan area <i>boardwalk</i> berbasis ramah lingkungan				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan fasilitas jalan raya (<i>street furniture</i>) berbasis ramah lingkungan				
		c. Pembangunan dan penataan area bazar dan cinderamata				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		d. Pembangunan rumah peristirahatan (<i>homestay</i>) untuk Wisatawan				
		e. Pembangunan <i>Tourist Information Center</i> di kawasan Parangtritis				
		f. Pembangunan fasilitas interpretasi dengan papan informasi yang representatif untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan pada pengunjung				
2.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Pantai Depok sebagai kawasan Wisata kuliner hasil laut dan dirgantara	a. Pembangunan dan penataan area kuliner hasil laut				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan Fasilitas parkir dan MCK				
		c. Pembangunan fasilitas umum (air, listrik dan telekomunikasi)				
		d. Pembangunan <i>rest area</i>				
		e. Pembangunan <i>community center</i>				
		f. Penataan area seni budaya				
		g. Pembangunan area bazar dan cinderamata				
		h. Pembangunan sarana kedirgantaraan				
3.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Gumuk Pasir Barchans sebagai kawasan konservasi geospasial dan cagar biosfer	a. Pembangunan area Wisata pendidikan <i>geospasial</i> berbasis budaya				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pengembangan museum Gumuk Pasir Barchans sebagai laboratorium alam				
		c. Pengembangan batas kawasan Konservasi Geomorfologi Spatial dan cagar biosfer Gumuk Pasir Barchans				
		d. Pembangunan fasilitas umum (air, listrik dan telekomunikasi)				
		e. Pembangunan Fasilitas parkir dan MCK				
		f. Pembangunan gardu pandang dan gazebo				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
4.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Pantai Kuwaru – Goa Cemara – Samas – Pantai Baru sebagai kawasan Wisata pantai keluarga dan pendidikan	a. Pembangunan dan penataan boardwalk berbasis alam sebagai rute Wisata susur pantai				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan dan penataan area agro Wisata tambak udang				
		c. Penataan zonasi konservasi dan pengembangan Wisata				
		d. Pembangunan area pelelangan dan kuliner hasil laut				
		e. Pembangunan Fasilitas parkir dan MCK				
		f. Pembangunan jalur permainan ATV yang representatif di sekitar pantai				
		g. Pembangunan <i>community center</i>				
		h. Pembangunan fasilitas umum (air, listrik dan telekomunikasi)				
		i. Pembangunan area Wisatalodge berbasis alam				
7.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Parangkusumo sebagai kawasan Ritual Budaya Laut	a. Pembangunan area Wisata even budaya dan olahraga				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan fasilitas umum (air, listrik dan telekomunikasi)				
		c. Pembangunan fasilitas interpretasi dengan papan-papan informasi yang representatif untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan pada pengunjung				
		d. Pembangunan Fasilitas parkir dan MCK				

Arah Kebijakan 10 : Pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam Mendukung Perintisan Pengembangan Baron – Sundak Sebagai Kawasan Wisata Pantai Berbasis Pendidikan dan Keluarga

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Pantai Baron sebagai pantai rekreasi kelurgadan kuliner hasil laut	a. Penataan areaWisata kuliner hasil laut				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan fasilitas parkir dan sarana MCK				
		c. Penataan lansekap desa Wisata pantai				
		d. Pembangunan sarana interpretasi dengan <i>sign and posting</i>				
		e. Pembangunan pendopo untuk Wisata pertunjukan seni dan budaya				
		f. Pembangunan dan penataan area <i>boardwalk</i>				
		g. Pembangunan pedestrian dan fasilitas jalan raya (<i>street furniture</i>)berbasis ramah lingkungan				
		h. Pembangunan <i>Community Center</i> di Kawasan pantai Baron				
		i. Pembangunan <i>Tourism information Center</i> yang representatif di kawasan pantai Baron				
		j. Pembangunan area bazar dan cinderamata tepian pantai Baron				
2.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Pantai Krakal sebagai kawasan Wisata berbasis konservasi sumberdaya alam	a. Pembangunan <i>shelter</i> dan penataan area bagi penjual ikan hias				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan sarana penelitian dan konservasi terumbu karang				
		c. Pembangunan <i>eco resort</i>				
		d. Pembangunan <i>landmark</i> dan <i>signage</i> di kawasan pantai				
3.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Pantai Sundak sebagai kawasan Wisata pantai Wisata luar ruangan	a. Pembangunan dan penataan <i>broadwalk</i> berbasis alam sebagai rute untuk kegiatan Wisata petualangan				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan <i>Community Center</i>				
		c. Penataan zonasi dan penataan lanskap di kawasan Pantai Sundak				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	dan relaksasi	d. Pembangunan fasilitas interpretasi dengan <i>sign and posting</i>				
4.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Pantai Kukup sebagai kawasan Wisata pantai berbasis konservasi terumbu karang	a. Pembangunan <i>Broadwalk</i> untuk jalur aktifitas menikmati pemandangan yang menggunakan material alami				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan fasilitas interpretasi dengan <i>sign and posting</i>				
		c. Pembangunan sarana pendidikan terumbu karang				
		d. Pengadaan fasilitas kebersihan dan fasilitas jalan raya (<i>street furniture</i>) pada jalur Wisata susur pantai				
		e. Pembangunan Fasilitas MCK				
5.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Pantai Ngrehenan – Pantai Gesing sebagai kawasan Wisata berbasis pasar dan perdagangan ikan	a. Pembagunan Pelelangan ikan di kawasan pantai Ngrehenan dan Gesing				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan <i>Community Center</i> di Kawasan Pantai Ngrehenan dan Gesing				
		c. Pembangunan Fasilitas parkir dan MCK				
		d. Pembangunan fasilitas umum (air bersih, listrik dan telekomunikasi)				
		e. Pembangunan area Wisata kuliner hasil laut				
6.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Pantai Ngobaran sebagai kawasan Wisata pantai berbasis budaya tradisional	a. Pembangunan pendopo sebagai area Wisata seni dan budaya				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan <i>broadwalk</i> guna mendukung jalur kegiatan aktifitas menikmati pemandangan				
		c. Pembangunan area Wisata kuliner hasil laut				
7.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam	a. Pembangunan <i>broadwalk</i> untuk rute kegiatan EkoWisata Pantai				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	mendukung Pantai Sepanjang sebagai kawasan Wisata pantai tropis alami	b. Pengadaan fasilitas kebersihan dan <i>beach furniture</i> yang mendukung konservasi pantai				bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		c. Pembangunan area kuliner hasil laut berbasis alam				
		d. Pembangunan gazebo dan gardu pandang berbasis alam				
		e. Pembangunan sarana interpretasi berupa <i>sign and posting</i>				
		f. Penataan permukiman penduduk menjadi rumah peristirahatan (<i>homestay</i>)				

Arah Kebijakan 11: Pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam Mendukung Perintisan Pengembangan Pantai Siung – Pantai Wediombo – Pantai Sadeng Sebagai Kawasan Wisata Berbasis Keanekaragaman Pantai Karst

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Pantai Siung sebagai kawasan Wisata minat khusus	a. Pembangunan dan penataan Wisata petualangan dengan mengembangkan aktivitas luar ruangan olahraga, berupa kegiatan panjat tebing dan susur pantai				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Penataan area dan rute aktifitas menikmati pemandangan				
		c. Pembangunan dan penataan area seni dan budaya berbasis ramah lingkungan				
		d. Pembangunan dan penataan area <i>boardwalk</i>				
		e. Pembangunan fasilitas umum (air, listrik dan telekomunikasi)				
		f. Pembangunan Fasilitas parkir dan MCK				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		g. Pembangunan dan penataan area bazar dan cinderamata tepian pantai				
		h. Pembangunan dan penataan area kawasan kuliner tepian pantai				
2.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung pantai Wediombo sebagai kawasan Wisata pantai berbasis konservasi dan relaksasi	a. Pembangunan dan penataan broadwalk sebagai rute untuk kegiatan Wisata petualangan berupa kegiatan susur pantai				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Penataan zonasi, vegetasi dan penataan lansekap desa Wisata				
		c. Pembangunan <i>Tourist Information Center</i>				
		d. Pembangunan fasilitas interpretasi berupa papan-papan informasi yang representatif berupa <i>sign and posting</i> untuk mendukung kegiatan Wisata				
		e. Penyediaan fasilitas kebersihan untuk mendukung upaya konservasi di pantai Wediombo				
		f. Pembangunan dan penataan area Wisata area seni dan budaya				
		g. Pembangunan Fasilitas parkir dan MCK				
		h. Pembangunan fasilitas umum (air, listrik dan telekomunikasi)				
3.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Pantai Sadeng sebagai kawasan Wisata pelabuhan perikanan	a. Pembangunan dan penataan tradisional <i>broadwalk</i> sebagai rute untuk kegiatan Wisata mancing				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan <i>Tourist Information Center</i>				
		c. Pengadaan fasilitas jalan raya (<i>street furniture</i>) berbasis alam				
		d. Penataan vegetasi dan lansekap ping				
		e. Pembangunan fasilitas umum (air, listrik dan				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		telekomunikasi)				
		f. Pembangunan fasilitas interpretasi yang representatif				
		g. Pembangunan dan penataan area kawasan kuliner tepian pantai				
		h. Pembangunan dan penataan rute/jalur Wisata jelajah pedesaan nelayan dan tepian pantai				
4.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Bengawan Solo Purba sebagai kawasan Wisata	a. Pembangunan fasilitas pendukung Wisata pendidikan dan penelitian				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan Fasilitas parkir dan MCK				
		c. Pembangunan fasilitas umum (air, listrik dan telekomunikasi)				

Arah Kebijakan 12: Pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam Mendukung Perintisan Patuk Sebagai Kawasan Desa Wisata Kerajinan dan Agro-EkoWisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No
STRATEGI
INDIKASI PROGRAM
TAHAPAN
PENANGGUNG
JAWAB

I
II
III



1.

Mengembangkan Fasilitas Kepariwisataan dalam mendukung desa Wisata Bobung sebagai kawasan desa Wisatakerajinan Kayu Batik

a. Pembangunan rumah peristirahatan (*homestay*) atau *ecolodge* di desa Wisata bobung

Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum

b. Pembangunan area Wisata pendidikan kerajinan

c. Penataan area pertunjukan seni dan budaya

d. Penataan lanskapdan peningkatan kualitas vegetasi desa Wisata Bobung dengan memasukkan berbagai macam unsur – unsur alam dan budaya lokal



e. Pembangunan fasilitas umum (air bersih, listrik dan telekomunikasi)

f. Pembangunan fasilitas parkir dan MCK

g. Pembangunan dan penataan area bazar dan cinderamata

2.

Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung EkoWisata Hutan Bunder dan Wanagama sebagai kawasan Wisata pendidikan, dan Wisata berbasis aktivitas luar ruangan

a. Pembangunan broadwalk untuk jalur *ecotourism* dengan paket Wisata susur hutan Bunder dan Hutan Wanagama



Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum

b. Penataan zonasi dan penataan lanskap Hutan Bunder dan Wanagama

c. Pembangunan sarana pendidikan dan penelitian berbasis alam

d. Pembangunan dan penataan Wisataluar ruangan yang representatif

e. Pembangunan *rest area* di sekitar kawasan Hutan Bunder dan Wanagama



f. Pembangunan dan peningkatan kualitas area perkemahan di sekitar area Hutan Bunder dan Wanagama

3.

Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Gunung Nglanggeran sebagai kawasan Wisata ekologi – petualangan dan agro Wisata

a. Pembangunan *broadwalk* untuk rute Wisata hutan, perkemahan, penjelajahan, bersepeda, memancing, sebagai Wisata petualangan di Gunung Nglanggeran

Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum

4.

b. Penataan dan pengembangan area kebun buah dan sentra buah

c. Pembangunan fasilitas interpretasi dengan *sign and posting* untuk mendukung kegiatan Wisata petualangan



d. Penataan zonasi kawasan Gunung Nglanggaran untuk kegiatan Wisata petualangan

e. Pembangunan dan penataan rumah peristirahatan (*homestay*) untuk Wisatawan atau *eco – lodge* dan *eco – perkemahandi* Gunung Nglanggaran

Arah Kebijakan 13 : Pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam Mendukung Perintisan Pengembangan Kawasan Karst Pegunungan Sewu Sebagai Kawasan Wisata Berbasis Goa karst

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Kalisuci (Goa Glatikan, Goa Gelong, Goa Buriomah, Goa Pindul, Goa Grubug dan Goa Jomblang) sebagai kawasan Wisata minat	a. Pembangunan area Wisata susur Goa (<i>cave tubing</i>) dengan rute Goa Glatikan, Goa Gelong, Goa Buriomah, Goa Pindul, Goa Grubug dan Goa Jomblang				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan fasilitas interpretasi dengan papan-papan informasi yang representatif untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan pada pengunjung				
		c. Pembangunan area aktifitas menikmati pemandangan				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	khusus	d. Pembangunan area seni dan budaya				
		e. Pembangunan penginapan berbasis alam				
		f. Pembangunan fasilitas umum (air, listrik dan telekomunikasi)				
		g. Pembangunan fasilitas parkir dan MCK				
2.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung kawasan Wisata susur Goa Bribin – Goa Grubug sebagai kawasan Wisata susur Goa Karst keluarga	a. Pembangunan rute untuk kegiatan aktifitas menikmati pemandangan				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan Fasilitas parkir dan MCK				
		c. Pembangunan Rest Area				
		d. Pembangunan lodgedi sekitarGoa Bribin – Goa Grubug				
3.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Goa Rancang Kencono – Air Terjun Sri Gethuk sebagai kawasan Wisata ziarah	a. Penataan lampu buatan sebagai pembentuk suasana				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Penataan dan pembangunan area kuliner berbasis ramah lingkungan				
		c. Pembangunan fasilitas umum (air, listrik dan telekomunikasi)				
		d. Pembangunan fasilitas parkir dan MCK				
		e. Pembangunan <i>sign and posting</i>				

Arah Kebijakan 14 : Pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam Mendukung Perintisan Pengembangan Congot – Glagah – Trisik Sebagai Kawasan Wisata kuliner dan tradisional pantai



Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Glagah sebagai kawasan Wisataminat khusus, pantai dan agroWisata	a. Penataan rute Wisata untuk kegiatan Wisata petualangan dengan mengembangkan aktivitas seperti olahraga dan aktifitas luar ruangan				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan area seni budaya untuk pertunjukan secara berkala				
		c. Penataan vegetasi dan lansekap				
		d. Pembangunan sarana interpretasi dengan <i>sign and posting</i> di sekitar di pantai Glagah				
		e. Pembangunan area <i>boardwalk</i>				
		f. Pembangunan area untuk display bazar dan cinderamata				
		g. Pembangunan sarana MCK				
		h. Pembangunan kawasan kuliner tepian pantai				
2.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Trisik sebagai kawasan desaWisata pesisir pantai	a. Pembangunan fasilitas MCK dan parkir				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan dan penataan area Wisata petualangan dengan mengembangkan aktivitas seperti olahraga dan aktifitas luar ruangan				
		c. Pembangunan sarana interpretasi dengan <i>sign and posting</i>				
		d. Pembangunan dan penataan zonasi serta lanskap desa Wisata				
		e. Pembangunan rumah peristirahatan (<i>homestay</i>) dan penataan lansekap				
		f. Pengadaan vegetasi di kawasan Trisik				
3.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam	a. Pembangunan dan penataan area mancing di Pelabuhan Karangwuni				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	mendukung Pelabuhan Karangwuni sebagai kawasan desa Wisata	b. Pembangunan sarana interpretasi dengan <i>sign and posting</i>				bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		c. Pembangunan fasilitas parkir dan sarana MCK				
		d. Pembangunan dan penataan area Wisata jelajah pedesaan nelayan dan tepian pantai berbasis budaya				
4.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung kawasan Congot sebagai kawasan Wisata alam keluarga	a. Pembangunan kawasan kuliner tepian pantai				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan sarana interpretasi dengan <i>sign and posting</i>				
		c. Pembangunan dan penataan area pelelangan ikan				
		d. Pembangunan fasilitas parkir dan sarana MCK				
8.	Mengembangkan kawasan Giriloyo sebagai kawasan Wisata ziarah	a. Pembangunan fasilitas Wisatazarah				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Pembangunan fasilitas bazar dan cinderamata				
		c. Pembangunan fasilitas parkir dan sarana MCK				

Arah Kebijakan 15 : Pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam Mendukung Perintisan Pengembangan Pegunungan Menoreh Sebagai Kawasan Wisata Berbasis Tirta, Religidan Desa Wisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Waduk Sermo sebagai area Wisata air, Wisata luar ruangan dan olahraga	a. Pembangunan <i>broadwalk</i> dengan mengembangkan aktivitas seperti olahragadan aktifitas Wisataluar ruangan di Waduk sermo berupa kegiatan susur danau				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan fasilitas MCK				
		c. Pembangunan <i>Community center</i> berbasis alam				
		d. Pembangunan gazebo dan area cinderamata				
		e. Penataan rute kegiatan aktifitas menikmati				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		pemandangan				
		f. Pembangunan area perkemahandi sekitar area waduk				
		g. Pembangunan <i>second home tourism</i> dengan pembangunan rumah peristirahatan berbasis alam (<i>ecolodge</i>) untuk mendukung kegiatan Wisata waduk pada kawasan Waduk sermo seperti <i>memancing, berperahu kano/kayak</i>				
		h. Pembangunan fasilitas parkir dan MCK				
		i. Pembangunan fasilitas umum (air bersih, listrik)				
		j. Pembangunan pertunjukan seni dan budayasecara berkala di sekitar Puncak Suroloyo				
		k. Pembangunan sarana interpretasi				
		l. Penataan area bazar dan cinderamata				
		m. Pembangunan kawasan Banjaroyo-Sentolo-Yogyakarta.				
2.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Kalibiru sebagai kawasan desa Wisata	a. Pembangunan dan ronovasi eco-lodge yang representatif				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan area Wisata luar ruangan dan Wisata jelajah				
		c. Pembangunan area pertunjukan dan even budaya				
		d. Pembangunan fasilitas umum (air bersih, listrik)				
		e. Pembangunan fasilitas parkir dan MCK				
7.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Goa Kiskendo sebagai kawasan Wisata alam	a. Penataan rute aktifitas menikmati pemandangan				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan dan penataan area Wisata <i>art dan culture show</i> secara berkala di sekitar Goa Kiskendo				
		c. Pembangunan fasilitas parkir dan MCK di area Goa Kiskendo				
		d. Pembangunan dan penataan area display cinderamata				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		e. Penataan area titik lokasi pemasangan efek pencahayaan buatan untuk mendukung pengalaman Wisata				
12.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Sentolo – Lendah sebagai kawasan desa Wisata	a. Renovasi dan pembangunan bangunan rumah peristirahatan (<i>homestay</i>)				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan rambu-rambu penanda				
		c. Penataan dan pelebaran jalan masuk menuju kawasan				
		d. Pembangunan fasilitas umum (air bersih, listrik)				
		e. Pembangunan fasilitas penunjang kawasan Banjaroyo-Sentolo-Yogyakarta sebagai titik penghubung Kepariwisata Yogyakarta-Borobudur				
17.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Pendoworejo sebagai kawasan desa Wisata budaya	a. Pembangunan area pertunjukan dan even budaya				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pengembangan rumah peristirahatan (<i>homestay</i>)				
		c. Pembangunan dan penataan area agro Wisata				
		d. Pembangunan fasilitas umum (air bersih, listrik)				
21.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Goa Sriti sebagai kawasan Wisata alam dan sejarah	a. Pembangunan dan penataan <i>sign and posting</i>				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan area Wisata luar ruangan dan Wisata jelajah				
		c. Pembangunan sarana MCK				
		d. Pembangunan fasilitas umum (air bersih, listrik)				
25.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Banjarasri, Banjaroyo dan Ancol sebagai kawasan agroWisata dan desa Wisata	a. Pembangunan kawasan <i>rest area</i> di Pasar Mbendhok				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan area bazaar dan cinderamata				
		c. Renovasi dan pembangunan bangunan rumah peristirahatan (<i>homestay</i>)				
		d. Pembangunan area pujasera di sekitar kawasan				
		e. Penataan area agroWisata				
		f. Pembangunan/renovasi fasilitas Pariwisata yang rusak				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
26.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung mengembangkan Nglingso sebagai desa Wisata alam	a. Pembangunan dan penataan area agroWisata				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pengembangan rumah peristirahatan (<i>homestay</i>)				
		c. Pembangunan area kesenian budaya				
		d. Pembangunan fasilitas umum (air bersih, listrik)				
		e. Pembangunan fasilitas parkir dan MCK				
31.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Puncak Suroloyo sebagai kawasan Wisata spiritual dan alam	a. Pembangunan dan penataan area bazar dan cinderamata				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan fasilitas parkir dan MCK				
		c. Pembangunan area kesenian budaya				
34.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Sendangsono sebagai kawasan Wisata ziarah	a. Pembangunan <i>broadwalk</i> dan fasilitas jalan raya (<i>street furniture</i>) pada rute paket Wisata				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Penataan dan pelebaran jalan masuk				
		c. Pembangunan fasilitas umum (air bersih, listrik)				
		d. Pembangunan fasilitas parkir dan MCK				
		e. Pembangunan dan penataan <i>sign and posting</i>				
36.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Nanggulan-Pengasih sebagai kawasan Wisata kerajinan	a. Fasilitasi pengembangan fasilitas sentra kerajinan masyarakat				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan fasilitas display dan workshop				
		c. Fasilitasi pengembangan peralatan kerajinan				
		d. Pembangunan fasilitas umum (air bersih, listrik)				
		e. Pembangunan fasilitas parkir dan MCK				
37.	Mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Kalibawang sebagai kawasan sentra agroWisata buah	a. Pembangunan area pendidikan tentang buah				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		b. Pembangunan fasilitas pasar buah				
		c. Pembangunan fasilitas umum (air bersih, listrik)				
		d. Pembangunan fasilitas parkir dan MCK				



D. AKSESIBILITAS DAN/ ATAU TRANSPORTASI PARIWISATA

Arah kebijakan 1 : Pengembangan Moda Transportasi Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan sarana moda transportasi darat dan penyebaran yang nyaman dan aman disepanjang koridor Pariwisata utama	a. Pengembangan angkutan Wisata keliling perkotaan				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		b. Pengembangan angkutan Wisata antara kawasan pengembangan (Sleman – Kota, Kota – Bantul, Sleman – Kulonprogo dll)				
		c. Pengembangan kerjasama dengan perusahaan angkutan umum dan angkutan khusus milik swasta dalam rangka penyediaan moda transportasi darat di DIY				
		d. Pengembangan alternatif moda transportasi darat yang aman dan nyaman untuk mengurangi kemacetan.				
2.	Mengembangkan sarana moda transportasi perkeretaapian yang nyaman dan aman sebagai pendukung pembangunan Kepariwisata	a. Pengembangan kereta Wisata keliling perkotaan				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		b. Pengembangan kereta Wisata antara kawasan pengembangan (Sleman – Kota, Kota – Bantul, Sleman – Kulonprogo dll)				
		c. Peningkatan kuantitas armada perkeretaapian antar provinsi dari dan ke DIY				
3.	Mengembangkan sarana moda transportasi udara yang nyaman, aman, dan memenuhi kebutuhan penerbangan internasional sebagai gerbang utama Pariwisata untuk pendukung pembangunan Kepariwisata	a. Peningkatan kuantitas armada penerbangan antar provinsi dari dan ke DIY				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		b. Peningkatan kualitas armada penerbangan sesuai dengan standart internasional				
		c. Peningkatan Kualitas Bandar Udara Adisucipto yang merupakan Hub Pariwisata Yogyakarta				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
4.	Mengembangkan sarana moda transportasi penunjang pengembangan bandara yang nyaman dan aman	a. Penyusunan studi kebutuhan moda transportasi untuk mendukung pembangunan bandara baru di DIY				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		b. Pengembangan moda transportasi untuk mendukung pembangunan bandara baru sebagai pintu masuk internasional dan gerbang Wisatawan di DIY				
5.	Mengembangkan sarana moda transportasi penghubung antara Daya Tarik Wisata dan bandara yang nyaman dan aman	a. Pengembangan <i>light train</i> dari bandara lama menuju bandara baru; pusat kota menuju bandara				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		b. Pengembangan <i>shuttle bus</i> menuju ke bandara				

Arah kebijakan 2 : Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan prasarana transportasi darat yang nyaman dan aman di sepanjang koridor Pariwisata utama	a. Pembangunan <i>shelter</i> bis Pariwisata di tiap-tiap kawasan Wisata				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		b. Peningkatan kualitas terminal bis dan angkutan umum				
		c. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan				
		d. Peningkatan kualitas dan kuantitas <i>tourism signage</i>				
		e. Penambahan Armada Transportasi Bus Pariwisata untuk jalur- jalur tertentu				
		f. Integrasi pengembangan Pariwisata pada kawasan sekitar jalur jalan linkar selatan				
		g. Pengembangan fasilitas jalan yang ramah bagi pejalan kaki dan orang berkebutuhan khusus (disabilitas)				
2.	Mengembangkan prasarana	a. Pembangunan dan peningkatan kualitas stasiun				Organisasi perangkat



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	transportasi perkeretaapian yang nyaman dan aman sebagai pendukung pembangunan Kepariwisata	a. Pariwisata di seluruh kawasan pengembangan b. Perbaikan sistem perawatan stasiun c. Pengembangan jaringan jalur kereta api Parangtritis – Yogyakarta – Borobudur d. Peningkatan kualitas dan kuantitas <i>tourism signage</i>				daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
3.	Mengembangkan prasarana transportasi udara yang nyaman, aman, dan memenuhi kebutuhan penerbangan internasional sebagai gerbang utama Pariwisata untuk pendukung pembangunan Kepariwisata	a. Penyusunan studi kebutuhan pengembangan prasarana transportasi untuk mendukung pembangunan bandara baru di DIY b. Pengembangan prasarana transportasi untuk mendukung pembangunan bandara baru sebagai pintu masuk internasional dan gerbang Wisatawan di DIY c. Pengembangan bandara baru bertaraf internasional sebagai				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
5.	Mengembangkan prasarana penunjang pengembangan bandara internasional sebagai gerbang utama Pariwisata	a. Peningkatan kualitas bandara Adisutjipto sebagai hub utama DIY b. Peningkatan kualitas bandara di masing-masing kawasan pengembangan c. Peningkatan kualitas <i>runway</i> d. Peningkatan kualitas dan kuantitas <i>signage</i>				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
6.	Mengembangkan prasarana transportasi penghubung antara Daya Tarik Wisata dan bandara yang nyaman dan aman	a. Pengembangan jaringan jalur jalan lintas selatan menuju ke bandara baru b. Pengembangan <i>shelter</i> di titik-titik pemberhentian di jalur menuju Bandara baru c. Pengembangan stasiun penghubung bandara lama – pusat kota dan bandara baru				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan

Arah kebijakan 3 : Pengembangan Sistem Transportasi dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata



Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	mengembangkan sistem transportasi darat yang nyaman dan aman di sepanjang koridor Pariwisata utama	a. Penerapan manajemen kelalulintasan dalam pengaturan jalur lalu lintas darat				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		b. Mengembangkan sistem dan jejaring informasi transportasi darat Pariwisata				
		c. Peningkatan sistem kepastian jadwal keberangkatan dan kedatangan moda transportasi				
		d. Peningkatan jam operasi angkutan umum				
		e. Meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan dan keselamatan jasa transportasi Pariwisata				
2.	mengembangkan sistem transportasi perkeretaapian yang nyaman dan aman sebagai pendukung pembangunan Kepariwisataaan	a. Penerapan manajemen kelalulintasan dalam pengaturan jalur kereta api				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		b. Pemberian kesempatan dan kemudahan akses penerbangan asing untuk masuk dan meningkatkan frekuensi penerbangan				
		c. Mengembangkan sistem dan jejaring informasi transportasi kereta api Pariwisata				
		d. Meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan dan keselamatan jasa transportasi Pariwisata				
		e. Peningkatan sistem kepastian jadwal keberangkatan dan kedatangan moda transportasi				
3.	Mengembangkan Sistem transportasi udara internasional sebagai gerbang utama Pariwisata untuk pendukung pembangunan Kepariwisataaan	a. Memperkuat simpul bandara udara melalui keterpaduan fungsi terminal angkutan bus antar wilayah, kereta api dan angkutan perkotaan.				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		b. Penerapan manajemen kelalulintasan dalam pengaturan jalur penerbangan				
		c. Pengembangan kerjasama dengan berbagai maskapai				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		internasional (<i>global airlines</i>)				
		d. Mengembangkan sistem dan jejaring informasi transportasi Pariwisata udara				
		e. Meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan dan keselamatan jasa transportasi Pariwisata				
		f. Pembukaan kantor, sistem keimigrasian, dan pelayanan <i>Visa on Arrival</i> di Bandara Adisutjipto				
		g. Pengembangan sistem transportasi multimoda				
4.	mengembangkan sistem penunjang pengembangan bandara internasional sebagai gerbang utama Pariwisata	a. Penyusunan studi kebutuhan pengembangan sistem bandara baru				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		b. Pengembangan sistem transportasi untuk mendukung pembangunan bandara baru sebagai pintu masuk internasional dan gerbang Wisatawan di DIY				
		c. Pengembangan sistem transportasi multimoda penunjang bandara internasional baru				
5.	mengembangkan sistem transportasi terpadu penghubung antara Daya Tarik Wisata dan bandara	a. Menghubungkan titik bandara baru dengan simpul bandara udara melalui keterpaduan fungsi terminal angkutan bus antar wilayah, kereta api dan angkutan perkotaan.				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		b. Penerapan manajemen kelalulintasan dalam pengaturan jalur lalu lintas Jogja – Wates – Purworejo				
		c. Pengembangan sistem transportasi multimoda penghubung antara daya tarik dan simpul pergerakan Wisatawan				

E. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PARIWISATA


Arah kebijakan 1: Peningkatan Kapasitas dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kepariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan	a. Pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan masyarakat lokal dalam pembangunan Kepariwisata				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Perintisan pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan Kepariwisata				
		c. Pelatihan dan Pendidikan tentang Kepariwisata bagi masyarakat				
2.	Mengiatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan Pariwisata	a. Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam pengembangan Kepariwisata				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Peningkatan kapasitas organisasi pemerintah desa dalam pembangunan Kepariwisata				
		c. Peningkatan intensitas keterlibatan lembaga kemasyarakatan di dalam pengembangan Pariwisata				

Arah kebijakan 2: Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat di Bidang Kepariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang Pariwisata	a. Fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan usaha Wisata yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar kawasan Pariwisata				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Fasilitasi pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar kawasan Pariwisata				
		c. Fasilitasi pemberian modal usaha kecil menengah bagi masyarakat di bidang Pariwisata				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		d. Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi				
2.	Mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal	a. Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat b. Peningkatan kapasitas organisasi pemerintah desa dalam pembangunan usaha ekonomi masyarakat c. Peningkatan intensitas keterlibatan organisasi pemerintah desa untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi masyarakat lokal.				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

Arah kebijakan 3: PenGoatan Kesadaran Wisata Masyarakat

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapa pesona bagi terciptanya iklim kondusif Kepariwisata setempat	a. Peningkatan sosialisasi sadar Wisata pada masyarakat lokal b. Pengembangan media <i>campaign</i> pada media massa nasional (cetak) dan elektronik tentang sadar Wisata c. Pembinaan dan penataan kawasan Wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan prinsip-prinsip sadar Wisata/ sapa pesona d. Revitalisasi kelompok sadar Wisata dan lembaga masyarakat/ pemerintah desa mendukung pengembanganPariwisata				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
2.	Meningkatkan motivasi, kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali	a. Peningkatan Insentif dan kemudahan bagi masyarakat lokal terhadap akses permodalan bagi pengembangan usaha				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	dan mencintai alam dan budaya daerah	b. Pemberian bantuan permodalan dalam rangka pengembangan masyarakat lokal di sekitar kawasan Pariwisata				bidang Pariwisata
		c. Penyediaan lembaga keuangan desa yang menyediakan permodalan bagi pengembangan usaha masyarakat lokal				

F. INVESTASI PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Peningkatan Insentif Investasi Bidang Pariwisata Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan Pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi Penanaman Modal Asing dan modal dalam negeri di sektor Pariwisata	a. Penetapan Keringanan Pajak dalam periode waktu tertentu bagi Pengembangan Investasi				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Menurunkan tarif pajak daerah yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga/jasa				
2.	Meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi Penanaman Modal Asing dan modal dalam negeri di sektor Pariwisata	a. Kemudahan pengurusan dan penurunan biaya visa bagi Penanaman Modal Asing				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Pemberian fasilitas pajak penghasilan kepada bidang-bidang usaha di sektor Pariwisata				
		c. Perbaikan jasa pelayanan pajak untuk meningkatkan kesadaran Penanaman Modal Asing akan pentingnya pembayaran pajak.				
		d. Pembuatan aturan – aturan operasional mengenai penanaman modal asing di sektor Pariwisata				


Arah kebijakan 2 : Peningkatan Kemudahan Investasi di Bidang Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Debirokratisasi investasi di bidang Pariwisata	a. Pengembangan sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang Pariwisata				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi di bidang Pariwisata				
2.	Mengembangkan Deregulasi peraturan yang menghambat perizinan	a. Penyesuaian atau kemudahan urusan kontrak tenaga kerja				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Pengurangan jenis peraturan perijinan				

Arah kebijakan 3 : Peningkatan Promosi Investasi Di Bidang Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Menyediakan informasi peluang investasi di kawasan Pariwisata	Penyediaan informasi profil investasi				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
2.	Meningkatkan promosi investasi DIY di bidang Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri	a. Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor Pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan Wisatawan dan lama tinggal				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan sekretariat bersama promosi investasi di DIY				
		c. Pengembangan berbagai marketing kit investasi dari				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		kawasan pengembangan di DIY				
		d. promosi investasi sektor Pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet				
		e. Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan.				
		f. Penetapan negara-negara potensial sasaran promosi investasi Pariwisata di Indonesia				
		g. <i>Road show</i> promosi investasi sektor Pariwisata ke negara-negara potensial				
3.	Meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang Pariwisata dengan sektor terkait	Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi investasi				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

G. PEMASARAN PARIWISATA

a. PASAR WISATAWAN

Arah kebijakan 1 : Pemetaan, Analisis Peluang Pasar dan Perintisan Pemasaran ke Pasar Potensial

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial Wisatawan nusantara dan mancanegara	Pemetaan potensi pasar, pemetaan pola perjalanan dan preferensi produk, perencanaan pengembangan produk yang kompetitif untuk target pasar khususnya di kawasan DIY				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
2.	Merencanakan dan mengembangkan strategi	Pengembangan strategis promosi (<i>ATL = above the line dan BTL = below the line</i>) untuk sasaran Pasar Potensial				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggung jawab	<p>kawasan DIY berbasis prinsip-prinsip <i>responsible marketing</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Above The Line (ATL)</i> yaitu pemasaran dan promosi yang dilakukan dengan menggunakan media, baik cetak maupun elektronik seperti pemasangan iklan, pemuatan artikel di majalah atau surat kabar, iklan di televisi, dsb. • <i>Below The Line (BTL)</i> yaitu pemasaran dan promosi dalam bentuk penyelenggaraan event yang ditujukan langsung terhadap segmen pasar yang disasar. Harapannya adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada pasar, misalnya: sponsorship, pameran, penyelenggaraan event/festival, lomba, show performance, public relations, pameran dagang, pasar wisata, dsb. 				bertanggung jawab di bidang Pariwisata
3.	Melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan	<p>a. Perintisan dan pengembangan kerjasama terpadu pemasaran antar kawasan dan <i>stakeholder</i> Pariwisata terkait (co-marketing, dsbnya) yaitu dengan Badan Promosi (BPPD, BP2KY, dan Java Promo), dengan asosiasi industri Pariwisata (ASITA, PHRI, dll), dengan PT Taman Wisata, dan dengan maskapai penerbangan (Garuda, AirAsia, MAS, Lion Air, dan maskapai lainnya).</p> <p>b. Pengembangan paket Wisata minat khusus, <i>heritage</i>, budaya dan alam (bekerja sama dengan ASITA dan PHRI)</p> <p>c. Pengembangan promosi terpadu untuk event Pariwisata dan budaya yang diselenggarakan di DIY (Jogja Java Carnival, Festival Kebudayaan Yogyakarta, Biennale, dan event budaya, Pariwisata, dan kesenian</p>				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		lainnya).				
4.	Melakukan perintisan pengembangan citra kawasan Pariwisata melalui mengangkat keunikan dan kekuatan produk yang dimiliki kawasan Daerah	Pengembangan <i>branding</i> kawasan Pariwisata kawasan DIY, dan Penyusunan rencana tindak penjabaran <i>branding</i> dalam pengembangan produk dan program promosi				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

Arah kebijakan 2: Pemantapan Segmen Pasar Wisatawan Massal (Mass Market) dan Pengembangan Segmen Ceruk Pasar (Niche Market) dalam Mengoptimalkan Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Dinamika Pasar Global

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar	a. Intensifikasi promosi produk-produk minat khusus seperti pengamatan satwa, penjelajahan, rafting, <i>Wisata gaya hidup, Wisata kecantikan/kesehatan, golf dan lain sebagainya</i> berupa <i>niche market workshop</i> dengan portal khusus di website (<i>specialized online portal</i>)				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan pasar sasaran (<i>target market</i>) yang tepat bagi produk Wisata minat khusus Indonesia berdasarkan pendekatan <i>variable segmentasi</i> demografis, geografis, dan psikografis				
2.	Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu	a. Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui <i>community marketing</i> dan kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema.				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Program pemasaran dan promosi bertema khusus				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		untuk mendatangkan Wisatawan massal (misalnya: <i>taman bertema</i>)				
		c. Pengembangan bahan promosi secara tematik				
3.	Akselerasi pergerakan Wisatawan	a. Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu meliputi: penciptaan skema-skema promosi silang di sepanjang mata rantai industri Pariwisata dan yang terkait				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis pertemuan komunitas (<i>community marketing</i>), melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Promosi Wisata pada media khusus komunitas tertentu (tagihan kartu kredit, majalah hobi, buletin organisasi, dll). • Pemanfaatan pertemuan/event komunitas tertentu sebagai media promosi (pertemuan keluarga, komunitas hobi, dll). 				
		a. Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air, melalui: b. Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dll) c. Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industri Pariwisata dengan institusi pendidikan				
		d. Peningkatan kemudahan akses dan skema pembiayaan perjalanan Wisata, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Potongan harga terusan (<i>circuit discount</i>) • Keuntungan ganda atas jasa tertentu (<i>double benefit</i>) • Kartu keanggotaan (<i>traveller/expatriate card</i>) • One entry ticket yang berlaku untuk beberapa obyek Wisata 				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		<ul style="list-style-type: none"> Kredit Wisata (“<i>travel now, pay later</i>”) 				
		e. Intensifikasi pemasaran paket Wisata dan event tematik tertentu (tradisi kelokalan, religious, weekenders, dan sebagainya, seperti: paket Wisata untuk keluarga, kerabat, klan, dll,)				
4.	Intensifikasi pemasaran MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain.	a. Pemasaran MICE kepada komunitas profesi seperti akuntan, dokter, arsitek, dll.				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Kerjasama pemasaran MICE dengan PHRI				

Arah kebijakan 3 :	Pemantapan Segmen Pasar Wisatawan Massal (Mass Market), dengan fokus : a. Pengembangan Segmen Keluarga b. Komunitas (Hobbies) /Tradisi Budaya Pengembangan Segmen Ceruk Pasar (Niche Market) dengan fokus : a. Pengembangan Segmen MICE b. Pengembangan Segmen Mahasiswa/Pelajar
---------------------------	---

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan segmen pasar Wisatawan berbasis komunitas	a. Pengembangan paket-paket Wisata bagi komunitas (klan keluarga, hobi, keilmuan, dll) misalnya <i>touring</i> dan <i>family gathering</i> ke DTW utama di DIY				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Fasilitasi Program kegiatan khusus untuk para <i>hobbies</i> : misalnya <i>sponsorship</i> kegiatan klub otomotif, atau <i>club hobbies</i> lainnya				
		c. Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas (<i>community marketing</i>), melalui: <ul style="list-style-type: none"> Promosi Wisata pada media khusus komunitas tertentu (tagihan kartu kredit, majalah hobi, buletin 				



NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		<p>organisasi, dll).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan pertemuan/event komunitas tertentu sebagai media promosi (pertemuan keluarga, komunitas hobi, dll). 				
2.	Mengoptimalkan segmen kunjungan teman dan relasi terutama saat liburan dan wisuda	a. Pengembangan pemaketan dan pemrograman untuk keluarga mahasiswa dan pelajar yang berkunjung ke Yogya (wisuda, dll) dengan bekerjasama dengan sekolah/universitas, PHRI, ASITA, dan pengelola DTW				
		b. Pengembangan promosi DTW pada puncak kunjungan VFR (lebaran, wisuda, dll)				
3.	Merevitalisasi dan mendiversifikasi produk-produk Wisata bagi Wisatawan	a. Pengembangan produk-produk baru yang diminati Wisatawan dan mampu menarik minat Wisatawan dalam volume besar : <i>night bazaar, Sunday market, pasar barang antik, kuliner, pameran batik, pameran kerajinan</i> , terutama bagi segmen menengah – atas				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kePariwisataa
		b. Penyelenggaraan <i>event-event</i> di obyek-obyek Wisata secara rutin seperti konser musik, opera, atau dengan melibatkan sponsor tertentu				
		c. Pemasangan <i>sign dan post</i> untuk obyek-obyek tertentu dengan desain khusus (<i>lebih mudah tertangkap pandangan</i> dan mudah dikenali) di hampir semua jalur-jalur utama				
		d. Program pemasaran untuk mengembangkan segmen Wisatawan yang terfokus di daya tarik utama : <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Kraton – Malioboro : Kraton Ngayogyakarta, Malioboro, Benteng Vrederburg, Hutan Wanagama, Goa Kiskendo, Goa Selarong, Goa Cerme, Monjali, Museum Affandi, Museum Sonobudoyo, Pasar Beringharjo, Pasar Ngasem, Pasar hewan dan tanaman PASTI. • Kawasan Prambanan – Ratu Boko : Candi 				



NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		Prambanan, candi Ratu Boko, Candi Banyu Nibo, Candi Plaosan, Candi Kalasan <ul style="list-style-type: none"> Kawasan Pantai Selatan Yogya : Pantai Parangtritis, Pantai Depok, Gumuk Pasir Barchans 				
4.	Memberikan intensif khusus Wisata bagi Wisatawan	a. Pemberian fasilitas <i>Traveller Card</i> dan <i>One EntryTicket</i> bagi Wisatawan untuk dapat mengunjungi obyek-obyek Wisata setempat				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Kredit Wisata untuk para pelaku usaha Pariwisata dalam bentuk pinjaman lunak				
5.	Mengakselerasi program-program promosi Wisata secara lebih terfokus;	a. Penerapan prinsip pembangunan relasi dengan pelanggan (<i>customer relationship</i>) di segenap pelaku retail usaha Pariwisata				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Pengembangan model promosi bersama atau <i>co-marketing</i> dengan <i>travel related industries</i> setempat				
		c. Pengembangan dan penguatan <i>market research</i>				
		d. Pengembangan <i>Market intelligence</i> untuk segmen Wisatawan nusantara dan mancanegara (pembuatan program cerdas melalui website seperti yang sudah disediakan oleh para provider agen perjalanan)				
		e. Pembuatan Desain website khusus untuk domestik yang berisikan obyek-obyek dengan segmen domestik				
		f. Mengoptimalkan penggunaan social media marketing (<i>Facebook, Twitter, Youtube</i>) sebagai media komunikasi pemasaran untuk segala segmen dan beragam jenis program promosi Wisatawan nusantara dan mancanegara				
		g. Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air, melalui: <ul style="list-style-type: none"> Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dll) 				



NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industri Pariwisata dengan institusi pendidikan 				
6.	Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu	a. Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui <i>community marketing</i> dan kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema. (Contoh : Tahun Wisata Budaya, dll)				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan Wisatawan massal melalui <i>Direct Selling atau event-event</i> di pusat perbelanjaan) – dalam bentuk <i>direct selling - consumer show</i> dan <i>mall promotion</i> di kota-kota besar (Jakarta, Bali, Surabaya, Bandung)				
		c. Penggunaan <i>icon</i> atau <i>figure public</i> sebagai duta Wisata (dapat merupakan atlet, artis, actor, penyanyi) untuk berkampanye mengenai “JOGJA ISTIMEWA”				
		d. Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dll) • Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industri Pariwisata dengan institusi pendidikan 				
7.	Meningkatkan publikasi promosi Pariwisata	a. Peningkatan kecenderungan berWisata dan gaya hidup berWisata, melalui Kampanye Program Wisata dengan tema setempat (“local brand”)				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu meliputi: penciptaan skema-skema promosi silang di sepanjang mata rantai industri Pariwisata dan yang terkait (<i>Joint promotion, co-marketing</i>)				
		c. Peningkatan kemudahan akses dan skema				



NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		pembiayaan perjalanan Wisata, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Potongan harga terusan (<i>circuit discount</i>) • Keuntungan ganda atas jasa tertentu (<i>double benefit</i>) • Kartu keanggotaan (<i>traveller/expatriate card</i>) • One entry ticket yang berlaku untuk beberapa destinasi/obyek Wisata • Kredit Wisata (“travel now, pay later”) 				
		d. Penyiapan pusat-pusat informasi Wisata di mal-mal di berbagai kota dengan melibatkan para pelaku usaha setempat dan pemerintah daerah				
		e. Penyelenggaraan marketing award untuk para pelaku industri Pariwisata khususnya dalam rangka pengembangan segmen Wisatawan nusantara dan mancanegara				
8.	Mengembangkan segmen Wisata MICE	a. Pendukung bidding sebagai tuan rumah (<i>host</i>) MICE berskala internasional b. Penyusunan <i>Guidelines</i> (NSPK) untuk pendukung <i>bidding</i> sebagai tuan rumah (<i>host</i>) MICE berskala internasional c. Fasilitasi MICE yang dilakukan oleh sektor lain: kesehatan, kelautan dan perikanan, pendidikan, kehutanan dll				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata

b. CITRA PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Pengembangan dan Pemanfaatan Citra DIY sebagai Destinasi Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:



NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan dan memantapkan positioning	a. Penilaian dan penajaman kembali strategi <i>positioning</i> Pariwisata DIY dengan memfokuskan upaya promosi pada pasar domestik : Intensifikasi implementasi Kampanye “JOGJA ISTIMEWA”				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Penilaian dan penajaman kembali strategi <i>positioning</i> Pariwisata DIY yang berfokus pada core tourism products : MICE, Living Culture, Heritage				
		c. Pengembangan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada <i>brand image</i> yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan				
		d. Pengembangan social media sebagai media komunikasi utama dalam menyebarkan <i>brand image</i> daerah				
2.	Mengembangkan program perlindungan hak-hak konsumen	a. Penetapan <i>Does dan Don'ts</i> di destinasi-destinasi Wisata				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Penetapan Sistem <i>Ticketing</i> (penetapan harga maksimal harga tiket, parkir) dalam rangka melindungi hak-hak Wisatawan				

Arah kebijakan 2: Pengembangan Citra Kepariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman dan Berdaya Saing

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif	a. PR-ing yang kreatif dan berkemampuan diplomasi budaya				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang
		b. Pengembangan <i>YOGYAKARTA TOURISM CALL CENTER</i>				



NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	Pariwisata DIY	c. Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi media <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam tiga aras yaitu <i>social</i> , <i>mobile</i> , dan <i>experiential</i> .				bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		d. Peningkatan kualitas <i>websites</i> Pariwisata DIY				
		e. Pengembangan Yogyakarta <i>tourism cyber campaign</i> , melalui: <ul style="list-style-type: none"> • <i>E-Magazine, E-Brochure, E-Tourism Guide, interactive tools, dll</i> • <i>Social networking machines (facebook, twitter, youtube, my space, flickr, dll)</i> • <i>Online events (contest, blogging events, dll)</i> 				
		f. Pengembangan <i>linkage</i> jaringan <i>e-marketing</i> Pariwisata				
		g. Pengembangan promosi produk-produk Wisata minat khusus melalui <i>online portals</i>				

c. KEMITRAAN PEMASARAN PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Peningkatan Peran Media Komunikasi Pemasaran Dalam Memasarkan Dan Mempromosikan Wisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik	a. Intensifikasi promosi paket-paket Wisata melalui brosur-brosur, majalah, surat kabar, dll yang populer dibaca masyarakat Indonesia (misalnya majalah gaya hidup untuk masyarakat perkotaan) dalam bentuk advertorial				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Intensifikasi promosi Wisata melalui program acara televisi dan radio, baik lokal, nasional, dan internasional				
		c. Intensifikasi promosi <i>printing</i> material : brosur, leaflet				



NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		dengan tema tertentu (<i>Heritage, MICE, Culture, Living Culture, Alam</i>)				
		d. Pendistribusian Kit Promosi dalam bentuk CD, DVD kepada segenap pelaku usaha, dan pemerintah daerah yang diperkirakan memiliki keterkaitan pasar (Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Bali)				
2.	Mengembangkan <i>E-Marketing</i>	a. Pengembangan pemasaran dan promosi WisataDIY melalui website Pariwisata misalnya mengenalkan destinasi-destinasi domestik atau Daya Tarik Wisata minat khusus yang sesuai untuk segmen Wisatawan nusantara dan mancanegara				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Mengoptimalkan penggunaan social media marketing (<i>Facebook, Twitter, Youtube</i>) sebagai media komunikasi pemasaran untuk segala segmen dan beragam jenis program promosi Wisatawan nusantara dan mancanegara				
		c. Pengembangan Indonesia tourism cyber campaign, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • <i>E-Magazine, E-Brochure, E-Tourism Guide, interactive tools, dll</i> • <i>Social networking machines</i> (facebook, twitter, youtube, my space, flickr, dll) • <i>Online events (contest, blogging events, dll)</i> 				
		d. Peningkatan kualitas websites Pariwisata DIY melalui peningkatan dan pengkayaan fitur-fitur terkini <i>e-book, e-brochure</i>				
		e. Pengenalan dan sosialisasi Market intelligence untuk segmen Wisatawan nusantara dan mancanegara (pembuatan program cerdas melalui website seperti yang sudah disediakan oleh para provider agen perjalanan)				



NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		f. Community Marketing dengan melibatkan komunitas <i>hobbies</i> (motor, mobil) untuk menyelenggarakan event-event khusus (<i>Gathering, Auto Contest, Konser Amal, dsb</i>)				
3.	Meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif Pariwisata	a. Pengembangan <i>Jogja Tourism Call Center</i> b. Pengembangan jaringan informasi Pariwisata di berbagai lokasi strategis (<i>Find-It, TIC</i>)				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
4.	PR dan mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan dalam jumlah besar	a. Pembuatan Film Dokumenter dengan tema /latar belakang DTW Utama DIY (Budaya, Ziarah, Pantai, Pegunungan) b. Partisipasi pada <i>event-event travel mart</i> seperti : <i>Borobudur Travel Mart</i> c. Penyelenggaraan <i>event</i> dan festival budaya : Musik, kuliner, <i>Jogja fashion week</i> , kontes fotografi, pameran kerajinan dan batik				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
5.	PR dalam penanganan pembenahan citra paska bencana alam	a. Pembentukan SOP dan strategi dalam PR dalam penanganan <i>image recovery</i> b. Pembentukan skema kerjasama antar <i>stakeholder</i> dalam penanganan <i>image recovery</i>				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

Arah kebijakan 2 : Pengembangan Kemitraan Pemasaran yang Terpadu, Sinergis, Berkesinambungan dan Berkelanjutan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan	a.—Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan ekspor dan pengembangan investasi.				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang



NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	Pariwisata daerah	<p>b. PenGoatan promosi bermitra (<i>co-marketing</i>) dengan pelaku usaha Pariwisata</p> <p>c. Pengembangan fasilitas penjualan secara langsung (<i>e-commerce</i>) kepada Wisatawan untuk dapat membeli paket Wisata secara langsung</p> <p>d. Pengembangan kemitraan pemasaran dengan organisasi pengembangan destinasi</p>				bertanggung jawab di bidang perdagangan dan investasi
2.	Mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dn Wisatawan	<p>a. Pengembangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta implementasi Pemasaran Pariwisata yang bertanggungjawab</p> <p>b. Pengembangan konten bahan promosi Pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (<i>host</i>) dan penerima manfaat.</p> <p>c. Peningkatan penggunaan media promosi Pariwisata yang ramah lingkungan. (<i>paperless and recyclable material</i>)</p> <p>d. Pengembangan misi pendidikan melalui berbagai bentuk media kepada Wisatawan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>), seperti pengembangan panduan <i>does and don'ts</i>, <i>interpretation kit</i>, dan film iklan <i>responsible tourism behavior</i></p> <p>e. Pengembangan pola-pola insentif dan penghargaan (<i>reward</i>) untuk upaya pemasaran yang bertanggungjawab kepada pelaku usaha Pariwisata</p> <p>f. Pengembangan pola-pola sanksi (<i>punishment</i>) untuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemasaran yang bertanggungjawab.</p>				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
3.	Memfasilitasi pembentukan organisasi pengembangan destinasi	<p>a. Fasilitasi pembentukan organisasi pengembangan destinasi di Provinsi DIY</p> <p>b. Pengembangan skema kerjasama pemasaran, promosi,</p>				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang



NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		dan peningkatan investasi dengan organisasi pengembangan destinasi				bertanggung jawab

Arah kebijakan 3: Pendukungan Kebijakan Promosi Penggerak Wisatawan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Memberlakukan 5 hari kerja	a. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan ekspor dan pengembangan investasi.				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Peningkatan kegiatan akhir pekan dalam rangka meningkatkan minat berwisata wisnus di akhir pekan misalnya dengan kegiatan Wisata malam, <i>Sunday market</i> , <i>antiqueing</i> , kuliner, <i>craft bazaar</i> (penggemar barang antik, pemburu pernak-pernik)				
2.	Menyelenggarakan aneka program pendukung penerapan cuti bersama oleh pemerintah pusat	a. Peningkatan kerjasama dengan para pelaku industri Pariwisata dan dunia usaha (misalnya dengan mengadakan <i>Great Sale Promo</i> , <i>Bazaar</i> , <i>Event</i> , dsb) terkait dengan program cuti bersama				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

Arah kebijakan 4 : Pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan badan promosi Pariwisata daerah sebagai lembaga promosi dan pemasaran Pariwisata	a.—Fasilitasi pembentukan badan promosi Pariwisata				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab
		a. Peningkatan dan pengembangan fasilitas penunjang pembentukan badan promosi Pariwisata				
		b. Peningkatan program promosi kabupaten kota				



NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
						di bidang Pariwisata

H. INDUSTRI PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Peningkatan Kualitas dan Keragaman Produk-Produk Usaha Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan daya saing usaha Pariwisata	a. Peningkatan sertifikasi seluruh usaha Pariwisata di Yogyakarta				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Peningkatan standardisasi seluruh usaha Pariwisata dari level nasional ke internasional				
		c. Peningkatan kemampuan <i>managerial</i> dalam pengelolaan usaha Pariwisata berdaya saing internasional				
		d. Peningkatan kualitas hotel di seluruh kawasan				
		e. Peningkatan standard dan kualitas hotel sebagai sarana MICE bertaraf internasional				
		f. Pengembangan sistem <i>informal booking service</i> bebas biaya untuk semua produk/jasa Pariwisata yang dijual di DIY (bekerjasama dengan Telkomnet)				
2.	Menciptakan iklim usaha yang kondusif	a. Penyediaan sistem penjaminan transaksi pembayaran lintas negara (<i>dengan Letter of Credit dan Bank Goarantee</i> untuk transaksi bisnis Pariwisata).				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Penetapan penggunaan mata uang rupiah (<i>price quotation</i>) dalam penjualan produk Wisata di DIY				
		c. Peningkatan perlindungan usaha bagi industri spa lokal				
		d. Pengembangan sistem pendaftaran usaha Pariwisata				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		satu atap				
		e. Pengembangan sistem pendaftaran integratif untuk jenis usaha Pariwisata yang meliputi multi-aktivitas dan multi-produk (contoh: <i>perhotelan</i>)				

Arah kebijakan 2 : Peningkatan Fasilitas, Regulasi, dan Insentif Untuk Pengembangan Usaha Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan sistem dan skema fasilitas untuk usaha Pariwisata	a. Pengembangan insentif perizinan untuk melindungi industri Pariwisata lokal				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Fasilitas komunikasi antara pemerintah, usaha Pariwisata, dan masyarakat dengan menyelenggarakan forum koordinasi dan komunikasi secara reguler				
		c. Pemberian insentif kepada industri Pariwisata yang menggunakan produk lokal dan produk UMKM				
		d. Pengembangan sistem <i>delivery</i> yang tepat antara industri kecil/pemasok dengan industri Pariwisata				
		e. Pembinaan sistem anak angkat-bapak angkat antara industri besar dengan industri kecil/ masyarakat sekitar				
		f. Pemberian fasilitas/ ruang display bagi para pengusaha kecil di bidang Pariwisata untuk memamerkan produknya dan cendera mata khas daerah di hotel				
2.	Meningkatkan sistem dan	a. Penjajakan dengan industri asuransi dan perbankan				Organisasi



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	skema regulasi untuk usaha Pariwisata	untuk penerbitan sistim asuransi Pariwisata yang dapat diterapkan di DIY				perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Peninjauan ulang prosedur dan persyaratan pemberian izin pada perusahaan asing agar tidak merugikan usaha Pariwisata				
3.	Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di kawasan Pariwisata	a. Pengembangan Pusat informasi digital di setiap kawasan Wisata berkelas nasional dan internasional				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan Jaringan Kerjasama secara <i>online</i> antar kawasan Pariwisata				
		c. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di kawasan Pariwisata di DIY				

Arah kebijakan 3 : Penguatan Struktur Usaha Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Memfasilitasi pembentukan organisasi industri Pariwisata	a. Memfasilitasi terbentuknya Gabungan Industri Pariwisata DIY sebagai wadah dan koordinator kerjasama yang sinergis antar usaha Pariwisata				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
2.	Memperkuat mata rantai penciptaan nilai	a. Intensifikasi dan efisiensi badan-badan promosi yang telah ada untuk kembali digunakan sebagai wahana promosi bersama dengan sumber dana yang ditanggung bersama				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan dukungan promosi di kawasan				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		strategis				
		c. Pengembangan dukungan promosi di kawasan tertinggal				
		d. Peningkatan program pengembangan kawasan dalam menyalurkan dana CSR dari usaha-usaha Pariwisata				
		e. Pengembangan skema kerjasama antarusaha Pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk Wisata				

Arah kebijakan 4: penguatan kemitraan usaha Pariwisata dan UMKM dalam mendukung usaha Kepariwisataan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan pola-pola kerjasama industri lintas sektor	a. Peningkatan penyerapan <i>local content</i> dalam usaha akomodasi/hotel yaitu harus menggunakan sekurang-kurangnya 30% bahan lokal				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Penggunaan sumber daya lokal (Sumber Daya Manusia dan sumber daya lainnya) dalam penyelenggaraan usaha Pariwisata, (misal: hotel harus menggunakan sekurang-kurangnya 30% bahan lokal)				
		c. Penerapan penggunaan minimal 30% bahan lokal dalam seluruh rantai industri Pariwisata				
		d. Penerapan penggunaan minimal 30% Sumber Daya Manusia lokal dalam penyelenggaraan usaha Pariwisata				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
2.	Mengembangkan pola-pola kerjasama untuk keadaan darurat	a. Pembuatan <i>pilot project</i> pemulihan pasca bencana berdasarkan tema-tema kawasan				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan pola-pola pendampingan dalam pemulihan Kepariwisata pasca krisis				
		c. Pengembangan pola-pola rintisan dengan maskapai penerbangan dan PT.Angkasa Pura				
		d. Pengembangan pola-pola kerjasama dengan fasilitas akomodasi di daerah bencana				
		e. Penerapan <i>early warning system</i> di kawasan rawan bencana				
3.	Mengembangkan UMKM dalam mendukung usaha Kepariwisata.	a. Fasilitasi pengembangan UMKM di bidang Pariwisata				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab
		a. Pengembangan pola bapak angkat dalam pengembangan UMKM Pariwisata				
		a. Pengembangan jejaring pemasaran hasil UMKM Pariwisata				

I. KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

a. ORGANISASI PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Restrukturisasi dan Reposisi Organisasi Kepariwisata Di Tingkat Provinsi

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mereposisi Urusan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah	a. Pembentukan Dinas Pariwisata atau BLU Pariwisata				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Peningkatan anggaran untuk pengembangan Pariwisata				
		c. Peninjauan kembali terhadap perkembangan Pariwisata daerah				

Arah kebijakan 2: Optimalisasi Koordinasi AntarDinas dan Dengan Kabupaten/Kota

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Menrencanakan partisipatif koordinasi lintas sektor (merujuk pada Inpres 16 tahun 2005 tentang Arah kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata)	a. Revitalisasi ataupun pembentukan unit kerja yang berfungsi mengkoordinasikan dan menggerakkan sinergi lintas sektor				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		b. Menginsentifkan komunikasi antar sektor.				
		c. Monitoring dan evaluasi <i>performance</i> unit kerja koordinasi lintas sektor.				

Arah kebijakan 3 : Optimalisasi Organisasi Kepariwisata Swasta dan Masyarakat Di Tingkat Provinsi

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Memperkuat peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan Kepariwisata melalui <i>Public-private Partnership</i> (PPP)/ <i>good tourism governance</i>	a. Pembentukan dan operasionalisasi GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) di tingkat provinsi DIY				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Pembentukan dan operasionalisasi BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah)				
2.	Mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang Pariwisata	a. Fasilitasi peningkatan peran organisasi masyarakat (Pokdarwis)				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Mengarahkan dana masyarakat di perusahaan-perusahaan swasta (CSR) untuk pembinaan organisasi masyarakat di bidang Pariwisata (pokdarwis)				

Arah kebijakan 4 : Optimalisasi Kemitraan Usaha Pariwisata Antara Pemerintah Provinsi, Swasta dan Masyarakat

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Memperkuatsinkronisasi antara pemerintah provinsi, swasta, dan masyarakat	a. Perencanaan partisipatif usaha Pariwisata melalui skema kemitraan				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Pembentukan forum-forum koordinasi usaha Pariwisata seperti Dewan Pariwisata Provinsi				
2.	Memperbaiki pelayanan pemerintah kepada swasta dan masyarakat	a. Pengembangan pelayanan satu atap dalam perijinan				
		b. Deregulasi dan debirokratisasi peraturan-peraturan terkait dengan Kepariwisata				
		c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.				



b. SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA

Arah kebijakan 1 : Optimalisasi dan Akselerasi Kompetensi SUMBER DAYA MANUSIA Pemerintah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Optimalisasi kapasitas SUMBER DAYA MANUSIA di provinsi dan kabupaten/kota.	a. Program <i>technical assistance</i> (<i>outsourcing</i> SUMBER DAYA MANUSIA)				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Program magang (<i>training program</i>)				
		c. Program pendidikan pengembangan Pariwisata (perencanaan, implementasi, dan money)				
		d. <i>Benchmarking</i> terhadap Badan Promosi Pariwisata Luar Negeri				
2.	Mempetakan kualifikasi kompetensi Sumber Daya Manusia	a. Pemetaan kebutuhan jabatan (Din. Provinsi, kabupaten/kota, dan BUMD)				
		b. Pemetaan kebutuhan kualifikasi pejabat dan staff (teknis dan non teknis)				

Arah kebijakan 2: Akselerasi Kualitas Institusi Pendidikan Kepariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Memperkuat institusi pendidikan Pariwisata	a. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah Pariwisata jenjang sekolah menengah, diploma, S1 dan S2				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Pemutakhiran kurikulum untuk semua jenjang pendidikan Pariwisata dengan standar internasional (<i>Common Asean Tourism Curriculum</i> , yang bisa mendapat pengakuan UNWTO)				
		c. Pemutahiran kurikulum untuk profesi tehnik/non gelar (perhotelan, pemandu Wisata dll) dengan				



No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		standar internasional.				
		d. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Kepariwisata bertaraf internasional				
		e. Remodifikasi kurikulum untuk penjurusan profesi Pariwisata (lisensi muda-madya-utama)				
2.	Mengembangkan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri Pariwisata	a. Kolaborasi pemerintah dan industri Pariwisata untuk program CO-OP mahasiswa (magang).				
		b. Kolaborasi pemerintah dan industri Pariwisata dalam penyaluran lulusan.				
		c. Program <i>Apprenticeship</i> (Magang) di institusi pendidikan Pariwisata dan perhotelan di luar negeri untuk tenaga pengajar				

Arah kebijakan 3: Standarisasi dan Sertifikasi Tenaga Pendidik

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Sertifikasi profesi tenaga pendidik (dosen)	a. Sertifikasi tenaga pendidik.				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Akselerasi kemampuan penelitian dan pengajaran tenaga pendidik S1 dan S2.				
		c. Pengakuan sertifikasi yang telah diberikan oleh lembaga pendidikan lain (<i>Waive of Certification</i>)				
2.	Akselerasi kualitas pendidik Kepariwisata.	a. Pemberian Beasiswa S2 dan S3				
		b. Inisiasi (pemprakarsaan) pembentukan Pusat Kajian Pariwisata baik di perguruan tinggi Pariwisata maupun umum.				


Arah kebijakan 4 : Optimalisasi Kuantitas SUMBER DAYA MANUSIA Industri Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Perancangan Jangka Panjang Kebutuhan sumber Daya Manusia Industri Pariwisata	a. Pendataan dan Inventarisasi Sumber Daya Manusia (jumlah, kualifikasi, Masa kerja, pengetahuan dan ketrampilan/pelatihan, bakat dan minat karyawan)				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
2.	Pemetaan Dan Pengadaan sumber Daya Manusia Industri Di Tiap-Tiap Kawasan Wisata.	a. Pemetaan proyeksi kebutuhan Sumber Daya Manusia industri di tiap-tiap kawasan pengembangan				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Perencanaan kebutuhan level dan karakter kompetensi Sumber Daya Manusia di tiap-tiap kawasan berdasar tema produk Wisata				
		c. Pemetaan proyeksi dan perencanaan kebutuhan level dan karakter Sumber Daya Manusia Pariwisata di kawasan				
		d. Pendataan dan Inventarisasi Sumber Daya Manusia (jumlah, kualifikasi, Masa kerja, pengetahuan dan ketrampilan/pelatihan, bakat dan minat karyawan)				
3.	Sertifikasi Profesi Di Bidang Kepariwisata	a. Sertifikasi tenaga di bidang Kepariwisata.				Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Akselerasi kemampuan tenaga di bidang Kepariwisata				
		c. Pengakuan sertifikasi yang telah diberikan oleh lembaga pendidikan lain (<i>Waive of Certification</i>)				
		d. Fasilitasi Sertifikasi bidang Pariwisata di tingkat provinsi				

GUBERNUR



DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO IS.

NIP. 19640714 199102 1 001